



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT**

2024



LAPORAN KINERJA

OUR CONTACT:

(0512) 21155 

KESBANGPOL.TANAHLAUTKAB.GO.ID/ 

KESBANG.TALA@GMAIL.COM 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut diukur atas dasar penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun 2024.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik "Good Governance" di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Pelaihari, 20 Januari 2025

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,



MOHAMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis PD Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra PD Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Tanah Laut.

Pada tahun 2024 terjadi potensi konflik sebanyak 2 kasus, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana potensi konflik terjadi sebanyak 5 kasus. Telah difasilitasi mediasi

keseluruhan potensi konflik sehingga pencapaian potensi gangguan stabilitas/gangguan kehidupan masyarakat yang tertangani sebesar 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat, dengan indikator Persentase potensi gangguan stabilitas/gangguan kehidupan masyarakat yang tertangani dari target 100% tercapai sebesar 100%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dari target 10% tercapai peningkatan sebesar 15,39%.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada indikator pertama yaitu Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat di Tanah Laut dengan target 100% tercapai 11,08% dan 11 Satuan Pendidikan.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase ormas yang aktif dengan target 25% tercapai 38,10%
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya pada indikator Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba target 75 tercapai 80,268 (Crosscutting BNNK).
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitasi dari target 100% tercapai 100%.

Demikianlah ringkasan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, yang tentunya ke depan menjadi perhatian kami untuk penyempurnaan penerapan LKj, khususnya pengembangan sistem pengumpulan data dan perangkat kinerjanya.

Pelaihari, 20 Januari 2025

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut,

MOHAMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 19790629 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Cascading Kinerja.....	4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
F. Isu Strategis.....	18
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	19
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	24
I. Sistematisasi Penyajian.....	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	28
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
C. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	35
1. Capaian Kinerja.....	35
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	37
3. Uraian Capaian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Lain di Provinsi Kalimantan Selatan.....	73
B. Analisa Keberhasilan/Kegagalan, hambatan dan langkah-langkah antisipasi	

yang diambil.....	74
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	80
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	80
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	90
3. Perbandingan Program dan Kegiatan TA 2023 dan 2024	94
4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	99
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	104
LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai.....	19
Tabel 1.2 Kualifikasi Pendidikan.....	19
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	20
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural	20
Tabel 1.5 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya.....	21
Tabel 1.6 Rincian Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024.....	22
Tabel 1.7 Rincian Anggaran Perubahan Tahun 2024	23
Tabel 1.8 Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024	24
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 2.2 Rumus Indikator Kinerja Utama.....	30
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	31
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama	36
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	37
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPD.....	37
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun Sebelumnya....	37
Tabel 3.5 Perbandingan dari Tahun ke Tahun	38
Tabel 3.6 Daftar Potensi Konflik Tahun 2024.....	39
Tabel 3.7 Daftar Peserta Pagelaran Budaya Tahun 2024.....	53
Tabel 3.8 Daftar Hibah Pengamanan Pilkada 2024.....	56
Tabel 3.9 Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024.....	58
Tabel 3.10 Rincian hibah Organisasi Masyarakat Tahun 2024	59
Tabel 3.11 Kegiatan Forkopimda selama Tahun 2024.....	66

Tabel 3.12 Nilai SAKIP Badan Kesbangpol 2024.....	72
Tabel 3.13 LHE AKIP 2024.....	72
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Kabupaten Lain.....	73
Tabel 3.15 Identifikasi Permasalahan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	76
Tabel 3.16 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2024.....	80
Tabel 3.17 Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024.....	82
Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	90
Tabel 3.19 Efisiensi Sasaran Strategis	92
Tabel 3.20 Ringkasan APBD Tahun 2023 terhadap Tahun 2024.....	93
Tabel 3.21 Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....	94
Tabel 3.22 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	99
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Tahun 2023 dan 2024.....	99
Tabel 3.24 Jabatan Kosong pada Badan Kesbangpol.....	100
Tabel 3.25 Efisiensi Anggaran Badan Kesbangpol 2024	101
Tabel 3.26 Pengembalian Dana Hibah 2024.....	101



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Cascading Kinerja.....	4
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis.....	5
Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi.....	16
Gambar 2.1 Aplikasi SILAPOR-Ormas.....	33
Gambar 3.1 Pj. Bupati Tala bersama Pengurus FKUB.....	41
Gambar 3.2 Rapat Tindak Lanjut Dugaan Penghinaan Ulama	43
Gambar 3.3 Mediasi antara Warga RT 10 dan Jamaah Salafi.....	44
Gambar 3.4 Berita Acara Kesepakatan antara Warga RT 10 dan Jamaah Salafi.....	44
Gambar 3.5 Pelajar Tanah Laut Lolos Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional.....	48
Gambar 3.6 Pemusatan Diklat Paskibraka	49
Gambar 3.7 Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih	50
Gambar 3.8 Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan.....	51
Gambar 3.9 Kegiatan Kemah Bela Negara.....	52
Gambar 3.10 Pagelaran Budaya.....	55
Gambar 3.11 Penandatanganan NPHD Polres Tanah Laut.....	57
Gambar 3.12 Penandatanganan NPHD Korem Antasari.....	57
Gambar 3.13 Aplikasi SILapor-Ormas.....	59
Gambar 3.14 Kemah Lintas Agama.....	60
Gambar 3.15 Sosialisasi Pendirian Rumah Ibadah.....	61
Gambar 3.16 Studi Tiru FKUB Tanah Laut ke FKUB Bogor.....	62
Gambar 3.17 Kegiatan Tes Urine Lingkup Pemkab Tanah Laut	63
Gambar 3.18 Penyerahan Armada KIE kepada BNNK.....	64
Gambar 3.19 Penyuluhan Ketahanan Ekonomi.....	65
Gambar 3.20 Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial.....	72
Gambar 3.21 Rapat Tim KDPD.....	71
Gambar 3.22 Penghargaan atas Pembiayaan Pilkada 2024.....	75

Gambar 3.23 Penghargaan atas Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024.....	75
Gambar 3.24 Penghargaan atas Terlaksananya P4GNPN.....	76
Gambar 3.24 Bukti Pengembalian Dana Hibah.....	102



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai..... 18

Grafik 3.1 Kejadian Konflik..... 69

Grafik 3.2 Nilai SAKIP Badan Kesbangpol..... 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pelayanan publik dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan Anggaran yang dialokasikan kepada Bupati, dapat dilaksanakan.

Maka dengan adanya regulasi ini Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut telah berupaya untuk menyusun Laporan Kinerja untuk tahun 2024. Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian

(LKj) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

Organisasi dengan indikator keberhasilan yaitu nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- b. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 kepada Bupati Tanah Laut.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- g. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

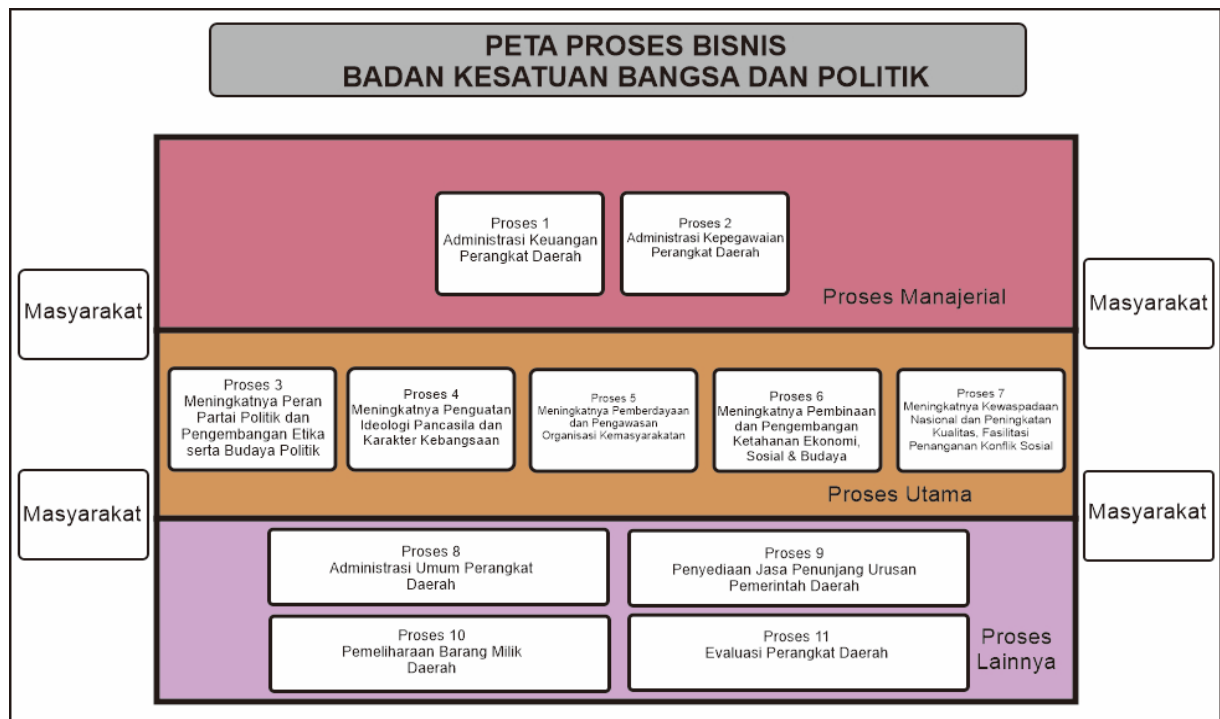
Gambar 1.1 Cascading Kinerja Badan Kesbangpol

[illegible]

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi

a. Proses Bisnis

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis



b. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber dayam manusia serta sarana dan prasarana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat,

keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dari sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

1.1 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA)
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Mengumpulkan dan mensistematiskan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana dan program kerja sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;

- d. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e. Melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. Mengendalikan arsip aktif;
- g. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- i. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- j. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. Mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- m. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di

Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat:

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

4) **Bidang Politik**

Bidang Politik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,

pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;

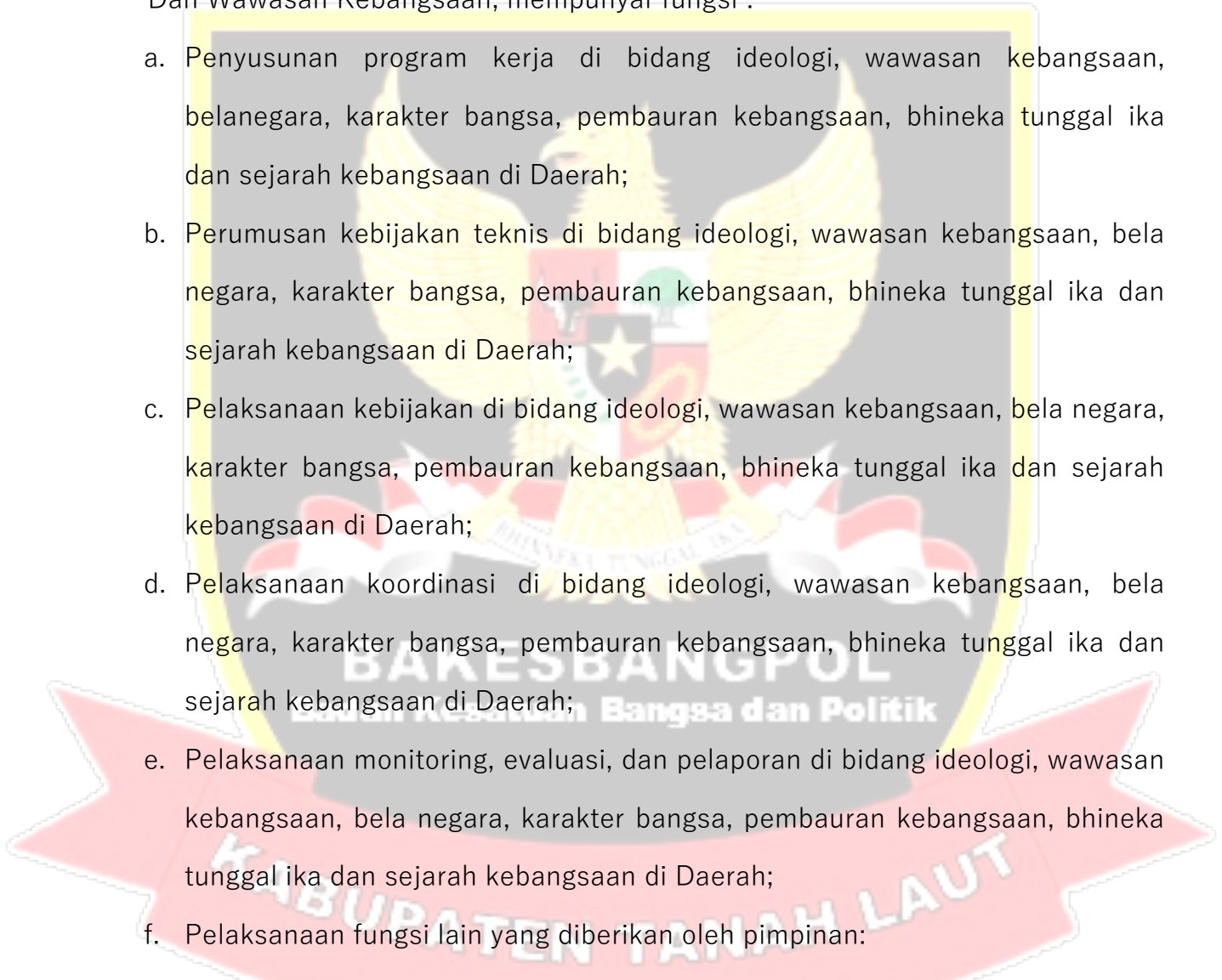
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah ;dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran

kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- 
- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

6) Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku ;

- b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara ;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional ;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik ;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

7) Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur dipimpin seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

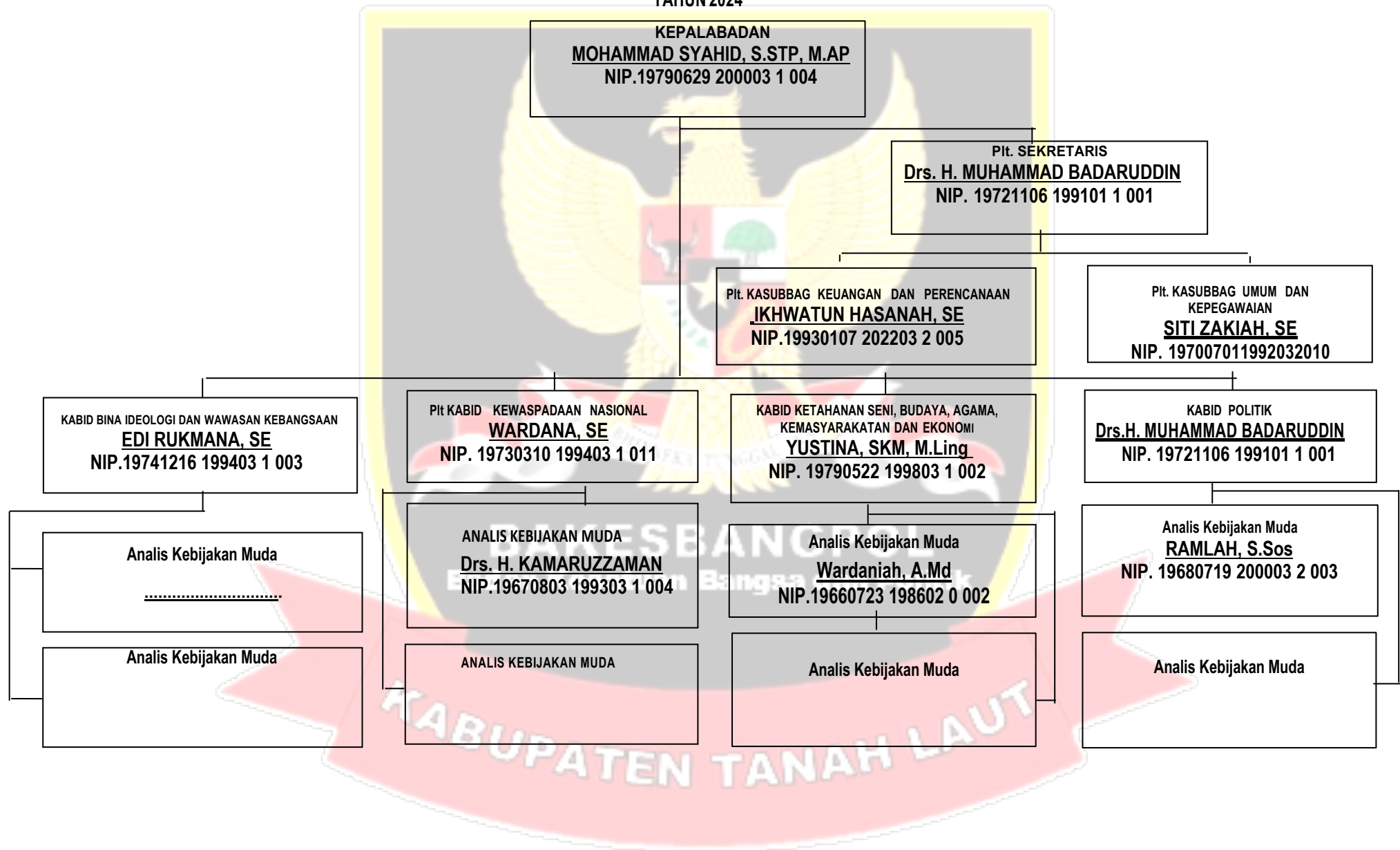
- i. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian keuangan dan perencanaan
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- ii. Bidang Kewaspadaan Nasional
- iii. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi,

- iv. Bidang Politik:
- v. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024:

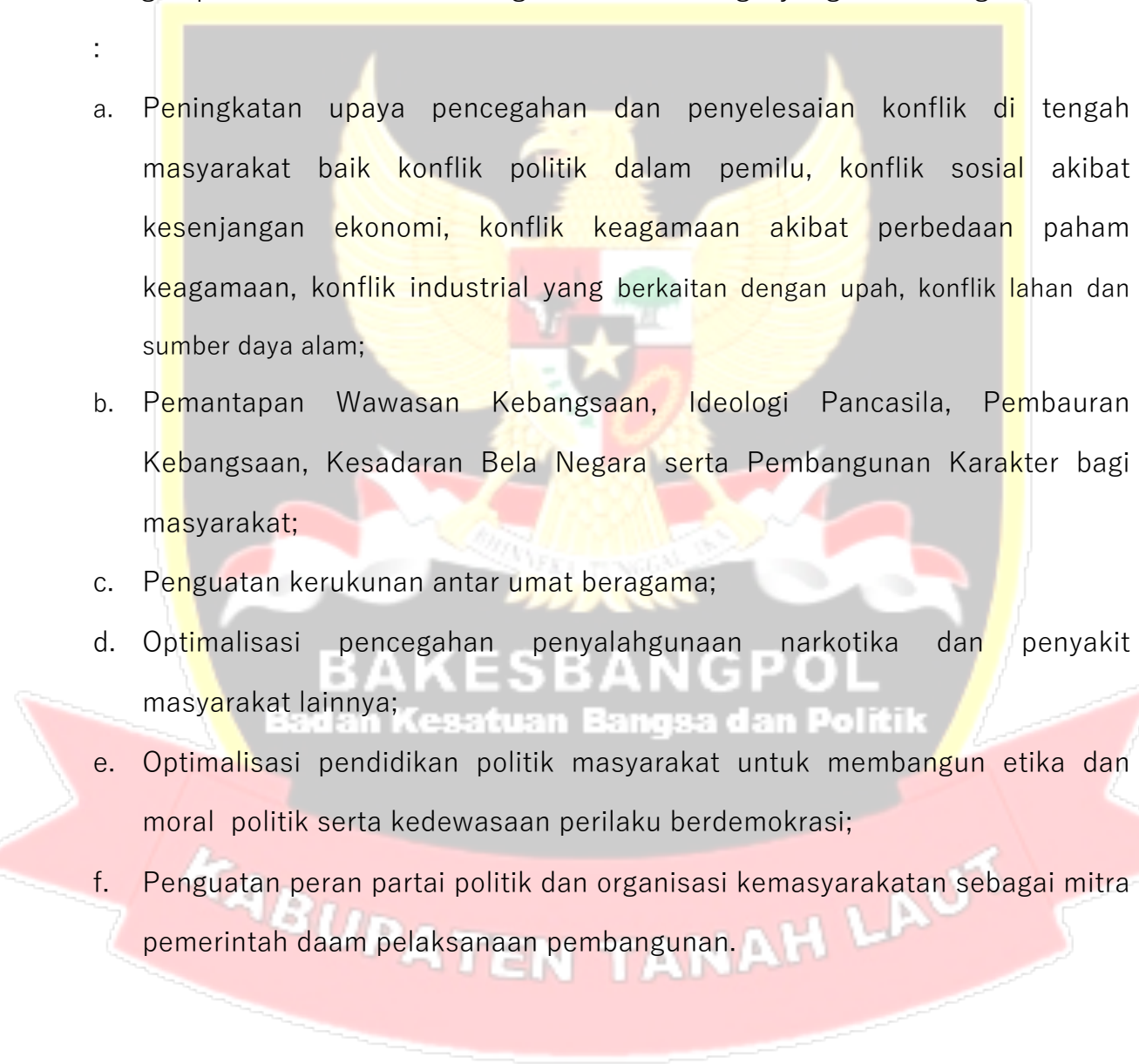


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024**



F. ISU STRATEGIS

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target dan sasaran guna meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang dikembangkan adalah :

- 
- a. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam;
 - b. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan, Kesadaran Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat;
 - c. Penguatan kerukunan antar umat beragama;
 - d. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
 - e. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
 - f. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Jumlah pegawai ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 24 Orang (Dua Puluh Empat) orang yang terdiri dari :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai

Sumber: Badan Kesbangpol 2024

NO	Jabatan	Jumlah	
1.	Kepala Badan	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang	3	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	0	Orang
6.	Fungsional Tertentu	2	orang
7.	Staf	14	Orang
Jumlah		23	Orang

Tabel 1.2

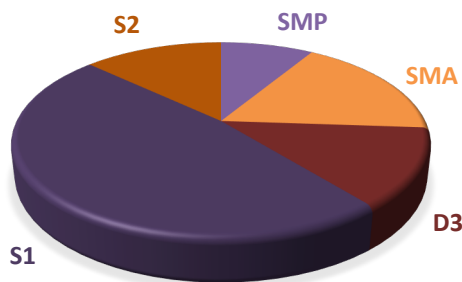
Kualifikasi Pendidikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	CPNS	
SD	0	0	0
SMP	2	0	2
SMA	4	0	4
D3	3	0	3
S1	11	0	11
S2	3	0	3
Jumlah	23	0	23

Sumber: Badan Kesbangpol 2024

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BADAN KESBANGPOL



Tabel 1.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/c	0 orang
2.	Muda	IV/b	1 orang
3.	Pembina TK. I	IV/a	4 Orang
4.	Pembina	III/d	6 Orang
5.	Penata TK. I	III/c	1 Orang
6.	Penata	III/b	1 Orang
7.	Penata Muda TK. I	III/a	3 Orang
8.	Penata Muda	II/d	3 Orang
9.	Pengatur TK. I	II/c	1 Orang
10.	Pengatur	II/b	1 Orang
11.	Pengatur Muda TK. I	II/a	1 Orang
12.	Pengatur Muda	I/d	
13.	Juru TK. I	I/c	
14.	Juru	I/b	
15.	Juru Muda Tk. I	VII	1 Orang
	PPPK		
	Jumlah	-	23 Orang

Sumber: Badan Kesbangpol 2024

Adapun jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Jumlah Pejabat Struktural

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
----	---------	------------	------------

1.	Kepala Kesbangpol	1 Orang	-
2.	Sekretaris Kesbangpol	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	3 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang	-
5.	Kepala Sub Bidang	-	-
6.	Pejabat fungsional Tertentu	-	2 Orang
7.	Pejabat fungsional umum	-	14 Orang
Jumlah		7 Orang	16 Orang

Sumber: Badan Kesbangpol 2024

Dalam rangka mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.5

Tabel 1.5
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Meja Kerja	37 unit	Baik
2	Meja Kerja pejabat Esselon II,III & IV	11 unit	Baik
3	Meja Rapat	7 unit	Baik
4	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik
5	Kursi Tamu	4 set	Baik
6	Kursi Rapat	19 unit	Baik
7	Kursi Putar	47 unit	Baik
8	Lemari Es	3 unit	Baik
9	Filling Besi	21 unit	Baik
10	Lemari Sorok	2 unit	Baik
11	Lemari Kaca	2 unit	Baik
12	Lemari Besi	14 unit	Baik
13	Komputer/ PC	17 unit	Baik
14	Laptop	18 unit	Baik
15	Printer	34 unit	Baik
16	Scanner	4 unit	Baik
17	Kendaraan roda 4	6 unit	Baik
18	Kendaraan roda 2	14 unit	Baik
19	AC Split	19 unit	Baik
20	Televisi	4 Unit	Baik
21	Jam Dinding	12 Unit	Baik
22	Sound System	9 Unit	Baik
23	Megaphone	1 Unit	Baik
24	Dispenser	7 Unit	Baik
25	Kamera DSLR	3 Unit	Baik

26	Hardisk External	3 Unit	Baik
27	Handy Talky	5 Unit	Baik
28	Papan Tulis	1 Unit	Baik
29	Kotak Bendera	1 Unit	Baik
30	Kipas Angin	7 Unit	Baik
31	LCD Projector Infocus	2 Unit	Baik
32	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
33	Gedung Aula	1 Unit	Baik
34	Gedung Parkir	1 Unit	Baik
35	Gazebo	1 Unit	Baik
36	Kanopi	2 Unit	Baik
37	AC Standing Floor	1 Unit	Baik

Sumber: Badan Kesbangpol 2024

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum terlalu ideal untuk ukuran kantor yang seharusnya. Salah satunya yaitu tidak adanya ruang pendukung seperti ruang perpustakaan dan arsip, gudang penyimpanan alat Paskibraka, dekorasi *front desk* resepsionis, serta ruang aula masih terbilang sempit. Hal ini masih cukup jauh dari ruang kantor yang representatif.

Adapun dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rincian Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 6.646.125.647
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.180.412.583
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp. 11.471.246.086
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 322.499.876
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 1.215.001.825

6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 899.227.825
	JUMLAH	Rp. 22.734.513.842

Sumber: DPA Badan Kesbangpol 2024

Sesuai Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1311/Perenc.Makro/2024 tanggal 03 Juni 2024 ditetapkan Perubahan Anggaran Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024 sehingga anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rincian Anggaran Perubahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 6.702.985.601
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.348.838.180
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Rp. 11.584.364.919
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 322.499.876
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 1.331.703.825
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 931.457.825
	JUMLAH	Rp. 23.221.850.226

Sumber: DPA-P Badan Kesbangpol 2024

Terjadi perubahan yang signifikan antara pagu anggaran pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Pada Tahun 2023 pagu Badan Kesbangpol sebesar Rp. 57.510.703.033. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesbangpol. Sedangkan pada Tahun 2024 pagu Badan Kesbangpol sebesar Rp.23.221.850.226, terdapat selisih sebesar Rp. 34.288.852.807 dibandingkan pada Tahun 2023.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Tabel 1.8 Matriks Tindak Lanjut SAKIP 2024

Sumber: LHE Badan Kesbangpol oleh Inspektorat

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja	Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja menyajikan informasi tentang <i>Crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Menyusun Crosscutting	1 Dokumen	Juni	Bagian Perencanaan dan keuangan	Crosscutting telah tersusun
		Agar Rencana aksi dibuat sesuai dengan aksi nyata dalam pencapaian kinerja, dan pemantauan rencana aksi secara berkelanjutan	Membuat tabel rincian rencana aksi target kinerja 2024	1 Dokumen	Juli	Bagian Perencanaan dan keuangan	Rencana Aksi telah tersusun
		Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) yang jelas	<i>Screenshoot feedback</i> atasan atas capaian kinerja	1 Dokumen	Juni	Bagian Umum dan Kepegawaian	Screenshoot feedback telah diunggah
		Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan pada Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mengunggah dokumen perencanaan pada website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	Juni	Bagian Perencanaan dan keuangan	Dokumen telah terpublikasi di website
2	Pengukuran Kinerja	Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan)	Melakukan rapat-rapat untuk menentukan target kinerja dan pencapaian kinerja yang telah dilakukan	Rapat-rapat	Triwulan dan semester	Bagian Perencanaan dan keuangan	Terlaksananya monev TW I pada 7 Juni 2023 dan TW II pada 18 Juli 2023
		Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya		1 Dokumen	Juli		Monev terdokumentasi
		Dalam penilaian SKP bulanan agar pimpinan memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) yang berkelanjutan	<i>Screenshoot feedback</i> atasan atas capaian kinerja	1 Dokumen	Juni	Bagian Umum dan Kepegawaian	Screenshoot feedback telah diunggah

3	Pelaporan Kinerja	Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran	Rencana Aksi	1 Dokumen	Juni	Seluruh Bidang	Rencana Aksi telah tersusun
		Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Rencana Aksi	1 Dokumen	Juni	Seluruh Bidang	Rencana Aksi telah tersusun
4	Evaluasi internal	Agar menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi internal tahun 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	1 Dokumen	Juni	Seluruh Bidang	Rencana Aksi Tindak Lanjut telah tersusun
		Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi kinerja per triwulan tahun 2024 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut	Laporan Triwulan	1 Dokumen	Juli	Bagian Perencanaan dan keuangan	Laporan Triwulan telah disampaikan



I. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyajian Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Cascading Kinerja

E. Prosesn Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

I. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

(LKj) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Eselon II (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dengan Tahun 2024

BAB. IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. Indikator kinerja Utama (IKU)
2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
5. Monev Renstra
6. Matriks Keselarasan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya lebih operasional dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut membuat Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat menuju kehidupan politik yang harmonis dan berakhlak;
2. Mewujudkan tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini bagi masyarakat:

3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kesbangpol serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kesbangpol menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam berpolitik.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
3. Meningkatnya Organisasi/ Lembaga politik yang aktif berpolitik
4. Meningkatnya desa sadar konflik
5. Meningkatnya penanganan pengaduan konflik
6. Meningkatnya forum kewaspadaan dini
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan
8. Meningkatnya kerukunan/keharmonisan antar umat beragama
9. Meningkatkan ketahanan, seni, agama , kemasyarakatan dan ekonomi.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
11. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
12. Meningkatnya pemenuhan dan pemeliharaan sapras kantor.

Sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai

sasaran strategi organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra PD Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra PD Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2024-2026 sesuai periode Renstra PD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	%	100%

Sumber: E-Sakip Badan Kesbangpol

Tabel 2.2
Rumus Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama Outcome / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	2	3	4	5

1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Jml potensi gangguan/Konflik sosial yang di tangani ----- x 100% Jumlah potensi gangguan Konflik sosial yang terjadi	Semua Bidang
---	--	---	--	--------------

Sumber: E-Sakip Badan Kesbangpol

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP	BB (70,25)
2	Sekretaris	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24
		Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24

		Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil survei pelayanan kesekretariat	90
3	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	10%
4	Kepala Bidang Politik	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	100%
			Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi	11 Satuan Pendidikan
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif	25%
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	75 (Indeks)
8	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitas	100%
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
			Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
4	Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
			Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian	100%
			Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

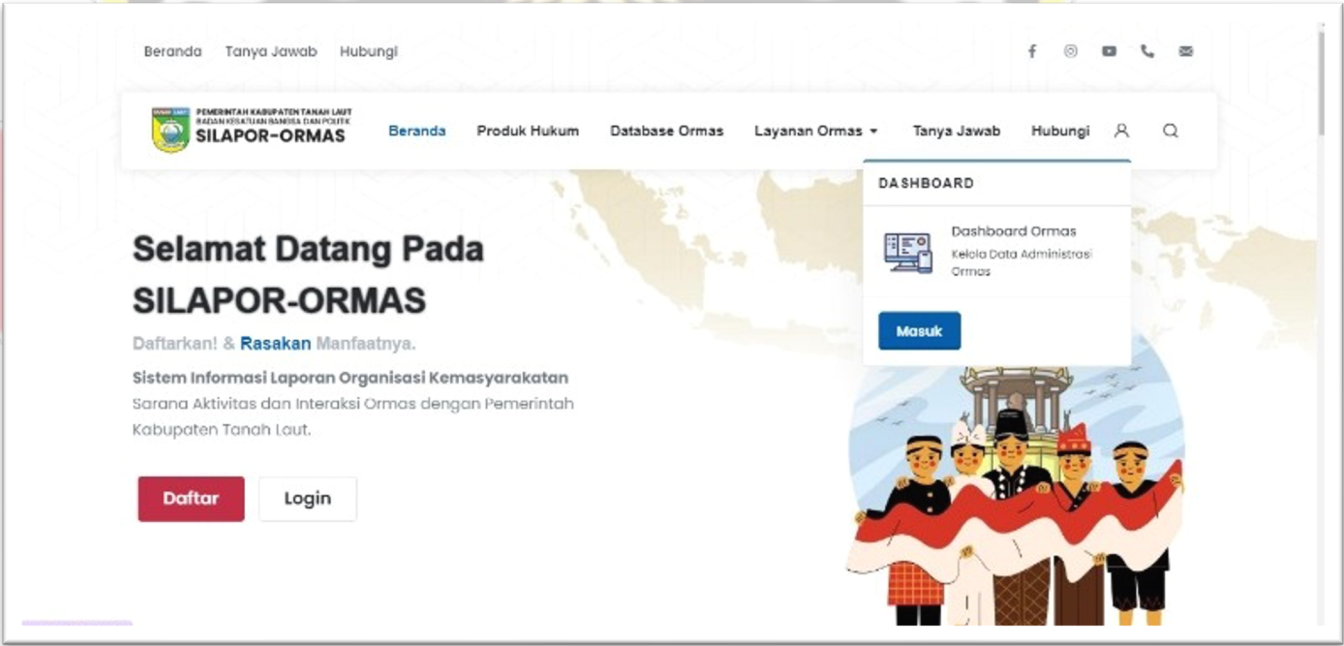
			Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

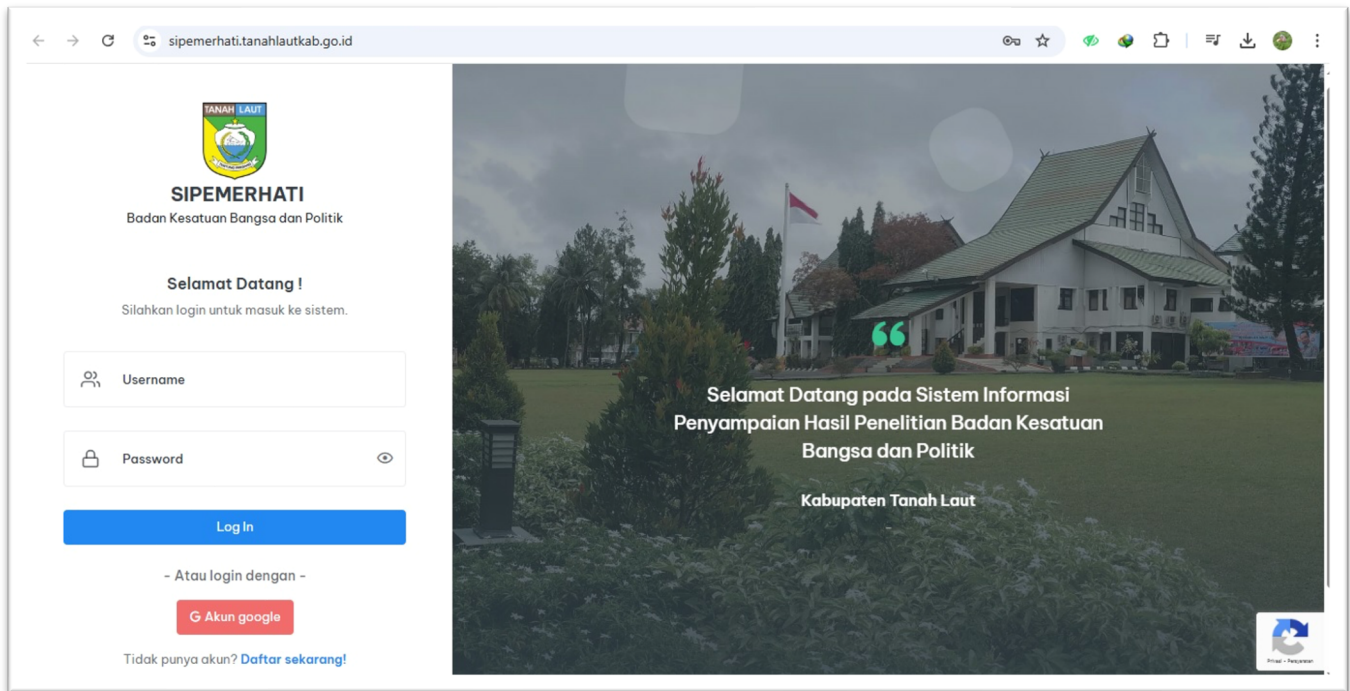
Sumber: E-Sakip Badan Kesbangpol

C. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Pada tahun 2024 melayani pemberian Rekomendasi Penelitian dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Masyarakat yang dikoordinir oleh Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dalam pemberian Rekomendasi Penelitian dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan didukung oleh aplikasi berbasis web.

Gambar 2.1 Aplikasi SILAPOR-Ormas





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Sasaran Strategis sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, oleh karena itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Capaian indikator kinerja utama akan dapat memberikan gambaran suatu

ukuran keberhasilan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Dalam menghitung capaian indikator kinerja utama dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditentukan.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama

	Kinerja Utama Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	PenjelasanRumus	PenanggungJawab / Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Jml gangguan/Konflik sosial yang di tangani ----- x 100% Jumlah gangguan Konflik sosial yang terjadi	Semua Bidang

Sumber: E-Sakip Badan Kesbangpol

Target indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah semua Bidang, dan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan realisasi 100%

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

<i>No.</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%

$$= \frac{\text{Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah Potensi Kasus Sosial yang terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ Kasus}}{2 \text{ Kasus}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPD

<i>No.</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>SATUAN</i>	<i>TAHUN 2024</i>			<i>TARGET AKHIR RPD</i>	<i>CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR RPD</i>
			<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>		
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Tahun	70,25 (BB)	77 (BB)	77 (BB)	80 (A)	96%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun Sebelumnya

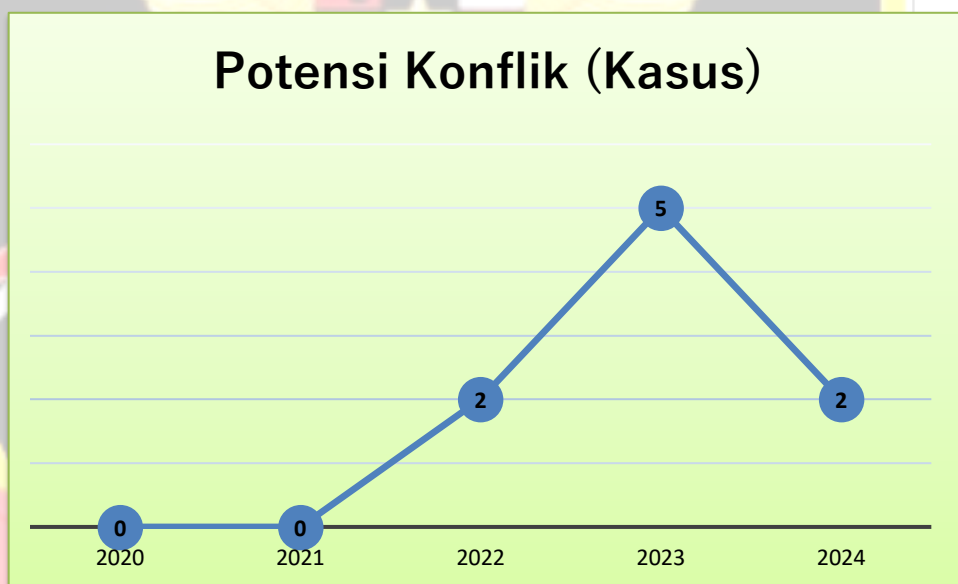
Sumber: Badan Kesbangpol

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	-	-	100%	100 %	100 %
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>BB</i>	<i>B</i>	<i>BB</i>

Tabel 3.5 Perbandingan dari Tahun ke Tahun

Sumber: Badan Kesbangpol

No	Tahun	Kasus	Keterangan
1	2020	0	Tidak ada kejadian (Kasus)
2	2021	0	Tidak ada kejadian (Kasus)
3	2022	2	Terdapat 2 kejadian (Kasus)
4	2023	5	Terdapat 5 kejadian (Kasus)
5	2024	2	Terdapat 2 Kejadian (kasus)



Terjadi penurunan potensi konflik pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan banyak upaya dalam memepertahankan agar tidak terjadi konflik selama tahun 2024. Meskipun terjadi potensi tetapi berhasil ditangani sehingga tidak terjadi konflik yang meluas dan mengkhawatirkan.

3. Uraian Capaian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tabel 3.7 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU). Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani

Indikator kinerja utama yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik adalah potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani.

Perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas Daerah dan menghambat pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial, yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Tabel : 3.6
Daftar Potensi Konflik Tahun 2024

No	Potensi Konflik	Tempat Kejadian Konflik
1	Dugaan penghinaan terhadap Guru Sekumpul yang dilakukan oleh seorang	Desa Padang Luas, Kurau

	ASN di media sosial	
2	Penggunaan Musholla warga RT 10 Kelurahan Pabahanan bersamaan dengan jamaah Salafi	Kelurahan Pabahanan, Pelaihari

Sumber: Badan Kesbangpol 2024

Potensi konflik yang terjadi selama tahun 2024 yaitu Konflik intern antarumat beragama dengan jumlah 2 kasus. Sedangkan jumlah potensi konflik intern dan antarumat beragama Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terjadi 3 konflik inter umat beragama dan berhasil dimediasi. Capaian kinerja Jumlah konflik intern dan antar umat beragama adalah sebesar 100%.

Kerukunan umat beragama menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten merupakan tugas dan kewajiban Bupati selaku kepala daerah dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

a. Konflik Inter dan Antar Umat Beragama yang dilakukan mediasi/fasilitasi.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut sebagai mitra dan mempunyai peran signifikan yakni bersama - sama bersinergi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama sehingga diperlukan sikap keterbukaan dari berbagai pihak dan kemampuan untuk memahami dan mencermati serta menganalisa sumber-sumber konflik ataupun potensi-potensi yang bisa mengarah tersulutnya konflik.



Gambar 3.1

Pj. Bupati Tanah Laut bersama Pengurus FKUB dan Kepala Badan Kesbangpol
(LKj) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu daerah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, hampir semua Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dihuni beraneka suku, ras dan agama tersebut menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten yang multikultural dan multiagama. Dengan beranekaragam ragam suku, ras dan agama akan sangat mudah terjadinya konflik apabila keragaman tidak dijaga dan dipelihara, oleh karena itu kehidupan harmonis dan rukun harus senantiasa dikokohkan di dalamnya, agar konflik tidak terjadi. Namun dalam perkembangan masih ada terjadi gesekan di kalangan antar suku, antar golongan dan antar agama. Pada Tahun 2024 ada konflik inter dan antar umat beragama, yaitu :

1. Dugaan penghinaan terhadap Guru Sekumpul yang dilakukan oleh seorang ASN di media sosial.

Postingan seorang ASN di media sosial diduga menghina Ulama (Guru Sekumpul) membuat geger masyarakat dan jika tidak cepat ditindak dikhawatirkan memicu kemarahan masyarakat secara luas. Berdasarkan keterangan dari keluarga dan rekan kerja yang bersangkutan sudah pernah melakukan hal tersebut dan sudah melakukan perjanjian untuk tidak melakukan hal tidak terpuji tersebut. Tetapi yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan memicu amarah masyarakat khususnya salah satu ormas. Setelah dilakukan mediasi bersama pihak Kecamatan, Ormas dan Polsek bersama Badan Kesbangpol, yang bersangkutan diberikan teguran dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut.



Gambar 3.2 Rapat tindak lanjut dugaan penghinaan Ulama di Aula Bela Negara

2. Penggunaan Musholla warga RT 10 Kelurahan Pabahanan bersamaan dengan jamaah Salafi

Perselisihan terjadi karena:

- b. Musholla yang ada di RT 10 jarang digunakan oleh warga setempat. Kemudian ada inisiasi dari Jamaah Salafi untuk menggunakan Musholla tersebut untuk berkegiatan seperti pengajian dan kajian-kajian lain oleh Jamaah Salafi. Melihat kondisi Musholla yang tidak terawat Jamaah Salafi memperbaiki Musholla tanpa sepengetahuan warga dan pengurus Musholla. Karena lahan Musholla yang ada di RT 10 merupakan hibah dari keluarga Jamaah Salafi.
- c. Warga Kelurahan Pabahan RT 10 tidak menerima jamaah Salafi menggunakan Musholla secara bersamaan, sehingga saat Ramadhan kegiatan sholat Tarawih dilaksanakan 2 kali. Pertama oleh warga setempat, dan yang kedua oleh Jamaah Salafi.
- d. Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan Musholla oleh Jamaah Salafi didapat dari pinjaman kepada Konsultan konstruksi, tetapi pihak Jamaah Salafi tidak dapat membayar sepenuhnya biaya tersebut.

Hasil kesepakatan :

- a. Kedua belah pihak menerima hasil kesepakatan dan saling menghormati dan saling menjaga hal-hal yang telah disepakati.

- b. Warga RT 10 Kelurahan Pabahanan memberikan bantuan kepada Jamaah Salafi sebagai bantuan terhadap pembangunan Musholla yang masih terhutang kepada pihak Konsultan sebesar Rp.101.000.000,- yang diserahkan secara tunai saat rapat mediasi.
- c. Pihak jamaah salafi akan menghibahkan bangunan tersebut kepada warga RT 10 Kelurahan Pabahanan.

Gambar 3.3 Mediasi antara Warga RT 10 dan Jamaah Salafi Kelurahan Pabahanan didampingi oleh FKUB Tanah Laut



Gambar 3.4 Berita Acara Kesepakatan antara Warga RT 10 dan Jamaah Salafi Kelurahan Pabahanan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN MASALAH HUTANG PIUTANG PADA SAAT PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSHALLA DARUL MUTTAQIN. SERTA
PENYELESAIAN MASALAH PENGELOLAAN MUSHALLA DARUL MUTTAQIN
DI RT.10 RW.04 KELURAHAN PABAHANAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan musyawarah mufakat guna menyelesaikan permasalahan hutang piutang serta permasalahan kepemimpinan Mushalla Darul Muttaqin di RT.10. Adapun hasil kesepakatan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak Masyarakat dalam hal ini adalah Warga RT.10 dan sekitarnya, bersedia untuk menyumbangkan dana sebesar Rp. 101.165.000,00 (seratus satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Pihak Majelis Salafi. Guna meringankan hutang yang timbul dalam proses pembangunan Mushalla Darul Muttaqin dengan catatan Pihak Majelis Salafi bersedia untuk menyerahkan pengelolaan Mushalla Darul Muttaqin kepada Panitia yang telah dibentuk oleh warga RT.10 Kelurahan Pabahanan serta bersedia menghibahkan tanah dan bangunannya disertai dengan dokumen pendukungnya;
- 2) Pihak Masyarakat dalam hal ini adalah Warga RT.10 dan sekitarnya, mengizinkan Majelis Salafi untuk menggunakan Mushalla Darul Muttaqin dengan kurun waktu maksimal selama 1 (satu) Tahun, untuk melaksanakan majelis ilmu serta kegiatan keagamaan lainnya dengan mengedepankan rasa toleransi beragama guna menjaga kerukunan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, khususnya warga RT.10 dan sekitarnya;
- 3) Jika ada hal-hal yang dianggap perlu. Maka akan dimusyawarahkan kembali secara mufakat yang didampingi oleh Tokoh Masyarakat setempat, dalam hal ini Ketua RW/Ketua RT, Pihak Kelurahan serta jika diperlukan dapat menohon fasilitas kepada FKUB Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari Pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak-pihak yang bertandatangan

Perwakilan Masyarakat RT.10
(Siswanto)

Perwakilan Salafi
(Hidayati, M.Kom)

Disaksikan dan diketahui oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Almakmun	Ketua FKUB Kab. Tanah Laut	
2	Wardana	Perwakilan Kesbangpol Kab. Tanah Laut	
3	AIPDA Hifni Ariandi	Perwakilan Polres Tanah Laut	
4	Abdul Bari	Perwakilan Koramil Pelaihari	
5	Waradian Bangkit Nugroho	Perwakilan Kelurahan Pabahanan	

Catatan:
Disertai dengan dengan daftar hadir terlampir.

Rekomendasi

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Melakukan dialog ke tokoh – tokoh lintas agama menyatukan persepsi dan pikiran untuk sama – sama menciptakan nuansa harmoni.

Ada tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian agar kerukunan tersebut dapat terwujud dalam masyarakat yang multikultural dan plural seperti Indonesia. Pertama, adanya para pengambil kebijakan publik yang adil dan mampu mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik tersebut terhadap kerukunan beragama. Kedua, adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas. Ketiga, adanya masyarakat yang berpendidikan dan bersikap rasional dalam menyikapi keragaman keagamaan dan perubahan sosial

4. Potensi Konflik Sosial pada Tahun 2024

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Realisasi indikator jumlah konflik sosial tahun 2024 adalah **0 konflik** karena tidak terjadi konflik sosial.

Di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir hampir tidak pernah terjadi konflik sosial. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya

melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya konflik melalui sosialisasi kepada anggota masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan rapat FKDM yang juga melibatkan seluruh anggota FKDM seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan tentang pelaporan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
2. Pembentukan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), anggotanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kejaksaan, Polres, Kodim, BIN, dan Badan intelejen Strategis yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
3. Optimalisasi pencegahan konflik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dengan materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pemangku kepentingan, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
4. Melaksanakan aksi P4GN melalui sidak/raja pada tempat hiburan malam bersama dengan BNN, Keploisian, Satpol PP, deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat yang ada ditempat hiburan di Tanah Laut.
5. Membentuk Perda tentang Fasilitas Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.

6. Pembentukan satgas internal anti narkoba di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam upaya pencegahan terjadinya potensi gangguan/konflik pada tahun 2024 antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Pembentukan dan Pemusatan Diklat Paskibraka

Pada kegiatan ini jumlah peserta yang direkrut sebagai Paskibraka Tingkat Kabupaten Tanah Laut berasal dari siswa-siswi SLTA/ sederajat. Seleksi Paskibraka yang dilaksanakan kemudian membentuk 33 orang Paskibraka terpilih. Disamping itu pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut mengirimkan 6 (enam) orang siswa dari SLTA di Kabupaten Tanah Laut untuk mengikuti seleksi Paskibra Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dimana siswa SLTA yang lulus seleksi Paskibra Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2 (dua) orang siswa. Pada tahun 2024 ini juga 1 (satu) orang Paskibraka Kabupaten Tanah Laut berhasil lolos sebagai Paskibraka Nasional untuk mengibarkan Bendera Pusaka di Ibu Kota Nusantara (IKN).



Gambar 3.5

Pelajar Tanah Laut Lolos Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional

Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Tanah Laut antara lain perangkat daerah terkait dilingkungan Pemkab. Tanah Laut dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut selaku pihak penyelenggara pendidikan Paskibraka Kabupaten Tanah Laut. Untuk keterlibatan pihak eksternal yaitu Kodim 9001/Tanah Laut, Polres Tanah Laut dan organisasi PPI Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur pendidik dan pelatih pada tahap pembetulan sekaligus keterlibatan instansi tersebut pada saat penugasan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT RI. Keterlibatan unsur utama lain pada kegiatan ini adalah pihak SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut selaku pihak yang mengirim anggota Paskibraka. Sedangkan keterlibatan instansi lain pada pemerintah pusat yaitu BPIP RI selaku pembina Paskibraka Tingkat Nasional.

Selain melaksanakan pembentukan dan pemusatan diklat Paskibraka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyelenggarakan Sosialisasi serta Penjaringan Paskibraka. Kegiatan Sosialisasi dan Penjaringan Paskibraka di Kabupaten Tanah Laut merupakan kegiatan dalam mengenalkan kegiatan kepaskibrakaan kepada para pelajar. Kegiatan ini juga menjadi motivasi bagi peserta untuk mempersiapkan diri agar dapat

mengikuti seleksi Paskibraka di tingkat Kabupaten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga menyelenggarakan lomba Paskibraka Tingkat Kabupaten Tanah Laut yang diikuti oleh Pelajar SLTA/Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan Lomba Paskibra Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan ajang prestasi anggota Paskibra di Sekolah dan menjadi tolak ukur pembinaan Paskibra di Sekolah agar lebih berkualitas sehingga diharapkan kedepannya akan menjadi kader dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka baik ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun di Tingkat Nasional.



Gambar 3.6

Pemusatan Diklat Paskibraka

b. Pembagian Bendera Merah Putih

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.10.1.1/2152/SJ tanggal 8 Mei 2024 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 79 Tahun 2024. Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut Bendera telah mengumpulkan Bendera Merah Putih dari sumbangan seluruh SKPD, BUMN, BUMD, Partai politik, Organisasi kepemudaan,

Organisasi Masyarakat, Sekolah dan Masyarakat dengan jumlah sekitar 12.000 (dua belas ribu) lembar.

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan agenda kegiatan yaitu :

- Penganjangan Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih pada tanggal 29 Juli 2024 di halaman Kantor Bupati Tanah Laut.
- Pembagian Bendera Merah Putih di mulai tanggal 29 Juli s.d. 15 Agustus 2024.



Gambar 3.7

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih

c. Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut merupakan kegiatan dalam mengenalkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kepada masyarakat untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara RAS, Suku, Agama dan Etnis di kalangan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan dengan Peserta Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2024 terdiri atas Kepala Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Budaya



Gambar 3.8
Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan

d. Kemah Bela Negara

Kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Kegiatan ini juga berhasil dalam membentuk dan mengembangkan karakter yang tangguh, disiplin, tanggung jawab, ketahanan fisik dan mental serta menambah pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan.

Kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada Tanggal 29 Nopember s.d. 2 Desember Tahun 2024 di Bumi Perkemahan Villa Arissa Desa Ketapang Kecamatan Bajuin.

Peserta Kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) Tahun 2024 berjumlah 350 orang yang terdiri dari:

- Penggalang Putra 5 Orang dan Penggalang Putri 5 Orang.
- Penegak Putra 5 Orang dan Penegak Putri 5 Orang.

- Pendamping 1 Orang Penegak Putra dan 1 Orang Penggalang Putra.
- Pendamping 1 Orang Penegak Putri dan 1 Orang Penggalang Putri.
- 1 Orang Pimpinan Kontingen



Gambar 3.9
Kegiatan Kemah Bela Negara

e. Pagelaran Budaya “Nusantara Kecil di Bumi Tuntung Pandang”

Kegiatan Pagelaran Budaya “Nusantara Kecil di Bumi Tuntung Pandang” di Kabupaten Tanah Laut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan Kebudayaan Nusantara kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Melalui kegiatan Pagelaran Budaya dapat mempererat tali persaudaraan dan persatuan antar masyarakat serta menumbuhkan rasa saling menghargai perbedaan kebudayaan.

Peserta Kegiatan Pagelaran Budaya “Nusantara Kecil di Bumi Tuntung Pandang” di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 22 Grup Jasa Pertunjukan dan 1 Orang Madihin. Adapun nama-nama peserta Kegiatan dalam kegiatan tersebut yaitu:

Tabel 3.7

Daftar Peserta Pagelaran Budaya Tahun 2024

NO	NAMA	Nama Grup
1	Muhammad Juhdi	Kambang Jaruju Jorong
2	Mirna Yasyitin Agustina	Sangat Tari Seni Tirta Kusuma
3	Kadek Mastri	Sanggar Saraswati
4	Abdullah	Tabas "Tutus Banjar Asli"
5	Ari Santoso	Sanggar Seni L-BABA
6	Yuyun	Perpedayak (PLB) Tanah Laut
7	Hervina Russanti	Gulinggang
8	Ach Fatori	Kawama Tanah Laut
9	Ratna	Sanggar Dhen Ariesta
10	Rospina	Paguyuban Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan
11	Eva Nopitasari Siagian	Serikat Tolong Menolong Batak Tanah Laut
12	Gatot Riyadi	Turonggo Yakso Anggun Budoyo
13	Kadinem	Singo Manggolo
14	Herry Winardi	Paguyuban Lembur Kuring
15	Aan Darwati	Mekar Wangi

16	Gumarawan Susanto	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) TALA
17	Muhammad Zulkipli	Dua Sekawan
18	Boby Hartanto	Tari Kuda Gepang Kec. Takisung
19	Muhammad Syafi'i	Mega Bunta
20	Mustika Gita Rifqi I.	Nogo Langgeng Budoyo
21	Hadani	Mamanda
22	Sri Rahmawati, S. Pd	Kwarran Kurau
23	Syahrani, AR.	LaungK uning Banjar

Sumber: Badan Kesbangpol 2024





Gambar 3.10
Pagelaran Budaya

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Pada tahun 2024 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah Bidang Politik telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Sosialisasi Pemilu/Pilkada Serentak di 11 Kecamatan
- Sosialisasi Pemilih Pemula SLTA/Sederajat di 11 Sekolah

- Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di 11 Desa
- Rapat Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Bimtek Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik
- Rapat tim pemantauan situasi politik daerah

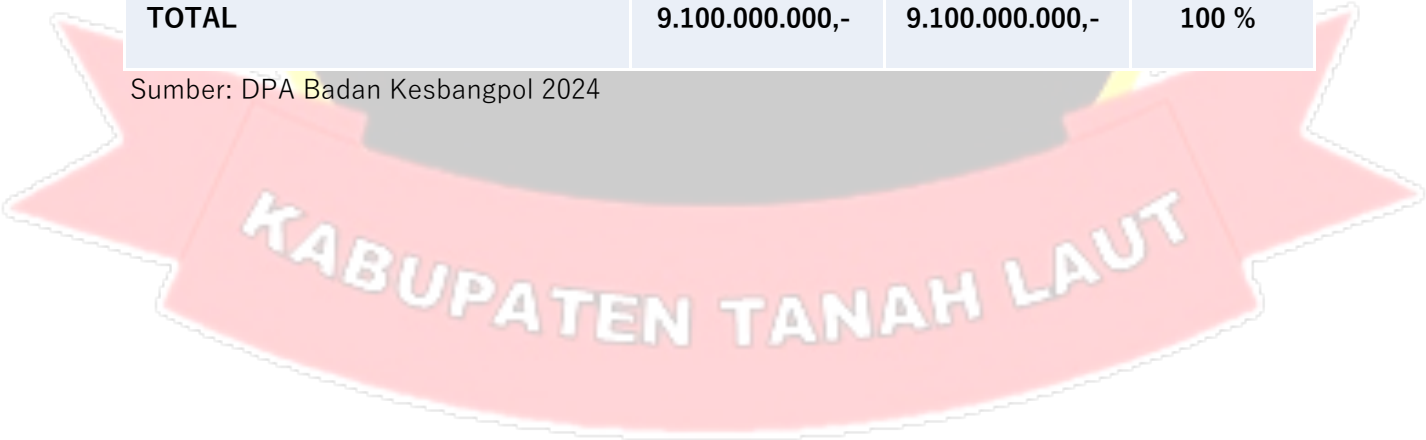
Selain kegiatan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Bidang Politik telah menyalurkan hibah Pengamanan Pilkada kepada Polres Tanah Laut dan Korem 101 Antasari dengan rincian:

Tabel 3.8

Daftar Hibah Pengamanan Pilkada 2024

No .	Instansi Penyelenggara	Total Dana Hibah (Rp)	Alokasi Dana Hibah. (Rp)	Persentase (%)
1.	Polres Tanah Laut	5.700.000.000,-	5.700.000.000,-	100 %
2.	Kodim 1009 Tanah Laut via Korem 101 Antasari	3.400.000.000,-	3.400.000.000,-	100 %
TOTAL		9.100.000.000,-	9.100.000.000,-	100 %

Sumber: DPA Badan Kesbangpol 2024



Gambar 3.11

Penandatanganan NPHD antara Pj. Bupati Tanah Laut beserta Polres Tanah Laut



Gambar 3.12

Penandatanganan NPHD antara Pj. Bupati Tanah Laut beserta Korem 101 Antasari



Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Bidang Politik juga telah menyalurkan hibah kepada Partai Politik dengan rincian:

Tabel 3.9 Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024

Sumber: Badan Kesbangpol Tanah Laut

NO	PARTAI	NILAI BANTUAN PERSUARA SAH (Rp)	PAGU 2024 MURNI	SUARA SAH HASIL PEMILU 2019 (8 BULAN)		SUARA SAH HASIL PEMILU 2024 (4 BULAN)		TOTAL DITERIMA (Rp) (6+8)
				JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH (Rp) (3x5x8/12)	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH (Rp) (3x7x4/12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GERINDRA	12.000	382.164.000	31.847	254.776.000	32.957	131.828.000	386.604.000
2	GOLKAR	12.000	261.960.000	21.830	174.640.000	31.961	127.844.000	302.484.000
3	PDIP	12.000	384.492.000	32.041	256.328.000	30.325	121.300.000	377.628.000
4	PAN	12.000	185.580.000	15.465	123.720.000	24.365	97.460.000	221.180.000
5	NASDEM	12.000	221.424.000	18.452	147.616.000	19.442	77.768.000	225.384.000
6	DEMOKRAT	12.000	125.112.000	10.426	83.408.000	14.856	59.424.000	142.832.000
7	PKB	12.000	155.232.000	12.936	103.488.000	14.412	57.648.000	161.136.000
8	PKS	12.000	177.960.000	14.830	118.640.000	9.525	38.100.000	156.740.000
9	PPP	12.000	111.564.000	9.297	74.376.000	8.559	34.236.000	108.612.000
10	HANURA	12.000	99.468.000	8.289	66.312.000	-	-	66.312.000
	JUMLAH		2.104.956.000	175.413	1.403.304.000	186.402	745.608.000	2.148.912.000

Periode I penyaluran bantuan keuangan kepada Parpol ditetapkan berdasarkan surat suara sah periode sebelumnya yaitu pada hasil Pemilihan Umum tahun 2019, sedangkan pada periode II ditetapkan berdasarkan surat suara sah pada pemilihan umum Tahun 2024.

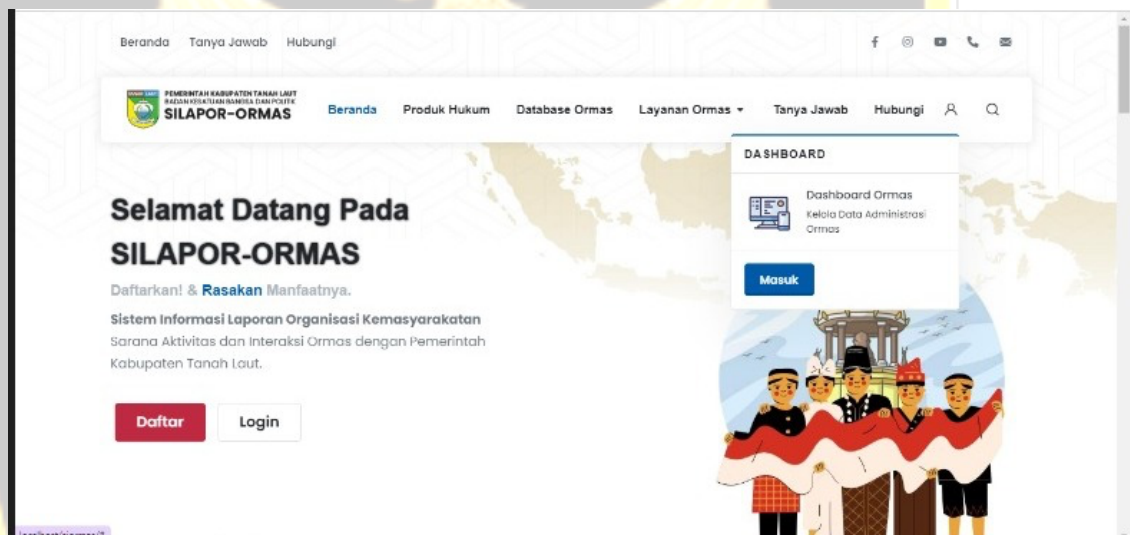
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada Program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain:

- Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah. Organisasi Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut diharapkan aktif dan melaporkan keberadaannya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web, SILapor-Ormas.

Gambar 3.13 Aplikasi SILapor-Ormas



Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyalurkan hibah kepada Organisasi Masyarakat setelah melalui tahapan administrasi dan verifikasi. Diharapkan dengan disalurkan hibah tersebut, Organisasi Masyarakat penerima hibah lebih aktif dalam bermitra dengan Pemerintah Daerah dan dapat memberi kontribusi positif di masyarakat.

Tabel 3. 10 Rincian hibah Organisasi Masyarakat Tahun 2024

Sumber: DPA Badan Kesbangpol TA 2024

Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Tanah Laut	120.000.000
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tanah Laut	60.000.000
Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Tanah Laut	127.500.000

Jumlah	307.500.000
---------------	--------------------

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pada Program ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

➤ Meningkatkan Peran FKUB

Meningkatkan peran serta tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat Tanah Laut, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi dengan menyelenggarakan mediasi konflik inter umat beragama dan rapat koordinasi para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanah Laut serta memberikan bantuan hibah kepada pengurus FKUB Kabupaten Tanah Laut, serta menggelar Kemah Lintas Agama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tanah Laut.

BAKESBANGPOL
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambar 3.14 Kemah Lintas Agama



Selain Kemah Lintas Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan FKUB Tanah Laut dan Kementerian Agama (Kemenag) Tanah Laut dalam menyelenggarakan sosialisasi Pendirian

Rumah Ibadah yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan. Sosialisasi pendirian rumah ibadah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan pendirian rumah ibadah. Sosialisasi pendirian rumah ibadah diharapkan dapat mempererat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.15 Sosialisasi Pendirian Rumah Ibadah



Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tanah Laut pada Tahun 2024 juga melakukan Studi Tiru Penanganan Konflik Umat Beragama ke FKUB Kota Bogor. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kerukunan antarumat beragama di Indonesia. FKUB di setiap daerah sering kali menghadapi tantangan yang berbeda-beda, bergantung pada kondisi sosial, budaya dan demografi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas FKUB adalah dengan melakukan studi tiru ke FKUB di daerah lain yang telah berhasil menjalankan program-programnya. Salah satu tujuan studi yang patut untuk ditiru adalah FKUB Kota Bogor, yang mana telah berhasil mencapai berbagai prestasi penting dalam menjaga toleransi antarumat beragama.

Kegiatan ini diisi juga dengan kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat ibadah, diantaranya Vihara Dhanagon, Gereja Zebaoth, Gereja Katedral, Pura Girikusuma dan Gedung Sekretariat FKUB.

Gambar 3.16 Studi Tiru FKUB Kab. Tanah Laut ke FKUB Kota Bogor



➤ Tes Urine Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tes urine dilakukan untuk menjalankan Peraturan Daerah No: 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanah Laut yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut. Tes urine dilakukan kepada pejabat eselon dua, tiga dan empat, serta pejabat fungsional. Sekitar 500 orang menjadi sasaran

dalam program ini. Tes urine dilaksanakan untuk mendeteksi dini penggunaan narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.17 Kegiatan Tes Urine lingkup Pemkab Tanah Laut



- Penyerahan Hibah Armada KIE Tes Urine kepada BNNK Tanah Laut
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyerahkan mobil operasional tes urine kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Tanah Laut. Penyerahan hibah berupa mobil tes urine dari Pemerintah Daerah kepada BNNK ini diketahui baru satu-satunya di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kabupaten Tanah Laut. Penjabat (Pj) Bupati Tala, H. Syamsir Rahman menyerahkan langsung mobil tersebut kepada

Kepala BNNK Tanah Laut, Ferey Hidayat yang disaksikan oleh Kepala BNNP Kalsel, Wisnu Andayana beserta unsur Forkopimda Tanah Laut dan para anggota DPRD Tanah Laut usai rapat paripurna peringatan Hari Jadi Ke-59 Tala di Gedung DPRD Tanah Laut.

Gambar 3.18 Penyerahan Armada KIE Tes Urine



➤ **Penyuluhan Ketahanan Ekonomi**

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat, program penyuluhan ketahanan ekonomi dirancang untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi, membangun keterampilan kewirausahaan, dan memperkenalkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Selain itu, penyuluhan ini juga berfokus pada pengoptimalan potensi sumber daya lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat jaringan ekonomi berbasis komunitas.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu

bertahan di tengah tekanan ekonomi, tetapi juga dapat berkembang menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, kegiatan ini dirancang untuk mendorong masyarakat agar lebih inovatif, adaptif, dan memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Dengan demikian, ketahanan ekonomi tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi realitas yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kegiatan ini bertempat di Aula Bela Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan narasumber dari Politeknik Negeri Tanah Laut dan Praktisi UMM Tanah Laut, serta dihadiri oleh perwakilan UMKM Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.19 Penyuluhan Ketahanan Ekonomi



Adapun target indikator kinerja Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2024 - 2026 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.

Melalui Program ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan

kegiatan-kegiatan antara lain:

- Meningkatkan koordinasi antar pimpinan instansi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengkoordinasikan isu-isu terkini dan memastikan cara penanganan dan penanggulangannya. Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanah Laut diikuti oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Komandan Kodim 9001/Tanah Laut, Kepala Polisi Resort Tanah Laut, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kepala Pengadilan Negeri Tanah Laut, Kepala Pengadilan Agama Tanah Laut serta para pimpinan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Forkopimda yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebanyak 12 kali kegiatan.

Tabel 3.11 Kegiatan Forkopimda selama Tahun 2024

Sumber: Badan Kesbangpol 2024

1.	Rapat koordinasi 29 Januari 2024.	Ruang VVIP Kediaman Bupati	Persiapan Jelang Pemilu serentak 2024.	
----	-----------------------------------	----------------------------	--	---

2.	Rapat koordinasi dan Monitoring, 13 Februari 2024	Lap.Pertasi dan Rumah makan Jorong Permai Kec.Jorong	Monev Jelang Pemilu serentak 2024.	
3.	Rapat koordinasi dan Monitoring, 14 Februari 2024	Rumah Makan Ina Pulau Sari Kec.Tambang Ulang.	Monev Pelaksanaan Pemilub serentak 2024	
4.	Rapat Koordinasi 16 Mei 2024	Hotel Grand Keisha Yogyakarta	1. Persiapan Pilkada Serentak 2. Batas desa antar Kecamatan 3. Menyambut Idul Adha 1445 H 4. Solar untuk nelayan 5. Kabupaten Tanah Laut akan menjadi tuan rumah Pekan Olah raga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan.	

5.	Rapat Koordinasi 13 Juni 2024	Ruang VIP Kediaman Bupati tanah Laut	Pelecehan dan Perundungan terhadap Anak	
6.	Rapat Koordinasi 22 Juni 2024	Swissbell Hotel Banjarmasin	1. Perundungan Anak 2. Persiapan Jelang Pilkada Serentak 3. Pengembalian hak guna lahan oleh Perusahaan kepada Masyarakat	
7.	Rapat koordinasi 21 Oktober 2024	Kediaman Pj. Bupati Tanah Laut	Membahas permasalahan PT. GMK dan progress menjelang Pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024	

8.	Rapat koordinasi 28 s/d 29 Oktober 2024	G'Sign Hotel Banjarmasin	Membahas terkait susunan keanggotaan Tim Sekretariat Forkopimda dan masukan dari seluruh anggota Tim terkait kegiatan forkopimda.	
9.	Rapat Koordinasi Nasional 06 s/d 08 November 2024	Sentul International Convention Center Bogor Jawa Barat.	Forkopimda menghadiri undangan Rakoornas yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Visi Presiden Republik Indonesia yang Maju dan berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.	 
10.	Rapat koordinasi dan Monitoring 26 November 2024	Kec. Bati-Bati, Kec. Tambang Ulang, Kec. Bumi Makmur	Rapat ini dilaksanakan sekaligus dengan monitoring distribusi surat suara Pilkada Kab. Tanah Laut Tahun 2024. Pj. Bupati bersama Pj. Sekda dan unsur forkopimda melakukan monitoring kesiapan di Kecamatan Tambang Ulang, Bati-Bati, Kuran dan Bumi Makmur	 

11.	Rapat koordinasi dan Monitoring 27 November 2024	Kediaman Pj. Bupati, Desa Tampang, Desa Ranggung, Desa Benua Tengah, Desa Panyipatan dan Desa Batakan	Rapat ini dilaksanakan sekaligus dengan monitoring pelaksanaan Pilkada Kab. Tanah Laut Tahun 2024. Pj. Bupati bersama Pj. Sekda dan unsur forkopimda serta kepala SKPD terkait melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Pilkada di sejumlah TPS.	 
12.	Rapat Koordinasi dan Monitoring, 24 Desember dan 31 Desember 2024 (Nataru)	Kediaman Pj. Bupati, Rumah Ibadan Umat Kristiani Objek Wisata	Memantau kondisi pengamanan dari personel gabungan dan ketertiban masyarakat yang beribadah di malam natal Memastikan situasi objek wisata kondusif untuk pengunjung dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2025	 

➤ Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial bertujuan untuk berkoordinasi antar lembaga, baik penegak hukum maupun masyarakat, mengidentifikasi konflik dan langkah-langkah penanganan konflik serta pencegahan konflik.

Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain aparat penegak hukum, instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta masyarakat.

Gambar 3.20 Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial



➤ Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk membahas dan menganalisis potensi ancaman atau peristiwa yang dapat memicu gangguan atau konflik sosial di masyarakat. Rapat ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap situasi yang berisiko, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan yang tepat agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Dalam kegiatan ini ada beberapa topik yang dibahas seperti persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, permasalahan batas desa yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian, serta adanya aliran-aliran agama yang harus diwaspadai keberadaannya. Selain topik permasalahan, peserta rapat yang hadir juga menyampaikan saran-saran terkait hal-hal yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.21 Rapat Tim KDPD



2. Nilai SAKIP Badan Kesbangpol

Tabel 3.12 Nilai SAKIP Badan Kesbangpol 2024

Sumber: LHE AKIP Badan Kesbangpol oleh Inspektorat

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	70,25 BB	77 (BB)	77 (BB)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/89/LHE AKIP-Irban I/Insp/2024 tanggal 01 April 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.13 LHE AKIP 2024

Sumber: Inspektorat Tanah Laut

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP 2024
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12
4	Evaluasi Internal	25	20
	Nilai Hasil Evaluasi		77 (BB)



Berdasarkan diagram di atas terjadi peningkatan pada nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak lepas dari perbaikan di beberapa komponen perencanaan hingga evaluasi sehingga nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol mengalami peningkatan yang cukup baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Lain di Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Kabupaten Lain

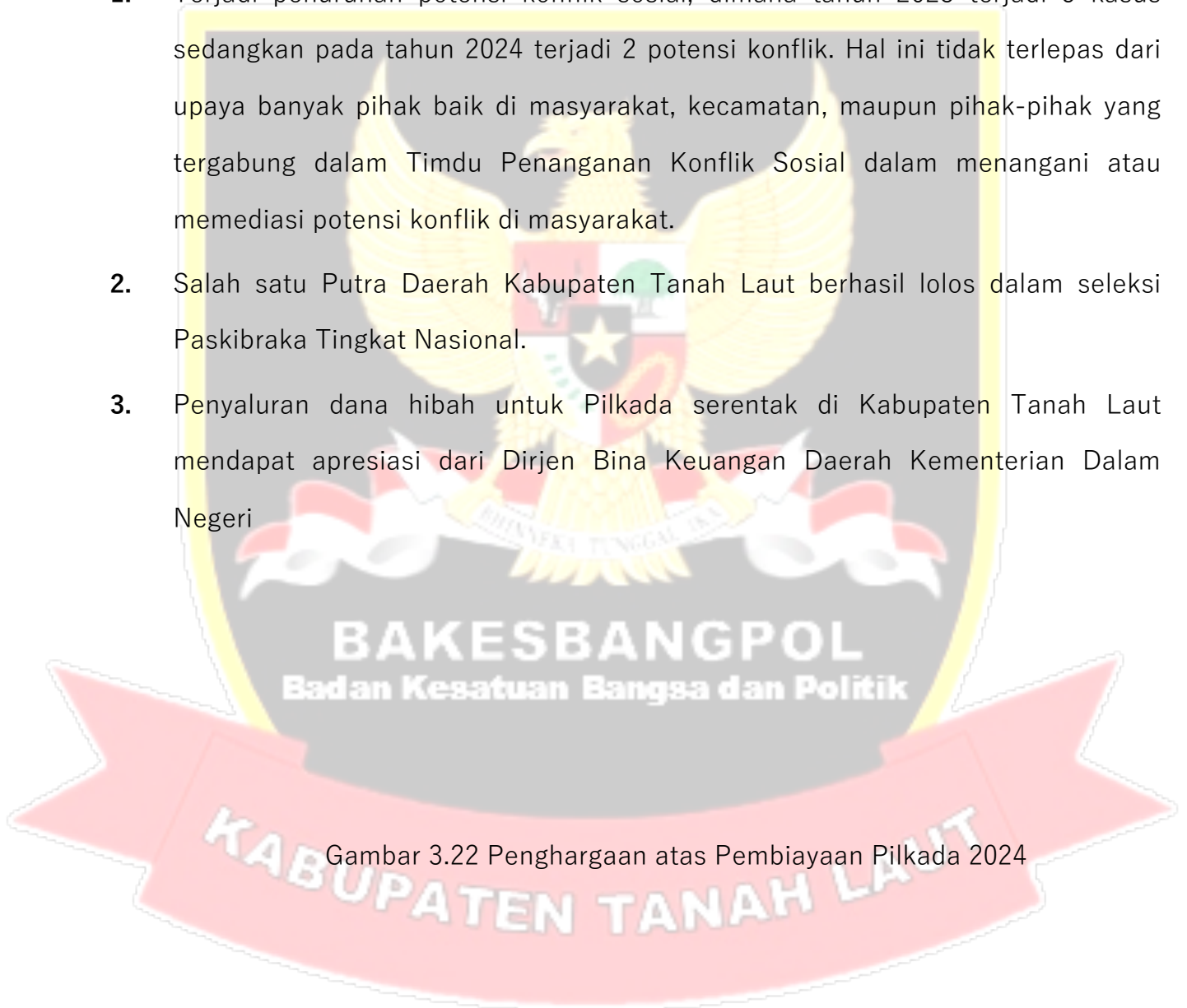
Sumber: Tertera pada Tabel

No	Bakesbangpol Tanah Laut	Bakesbangpol Barito Kuala	Bakesbangpol Banjarmasin	Bakesbangpol Hulu Sungai Utara
1	Sasaran : Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat Indikator : Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Sasaran : Terwujudnya Desa dan Kelurahan Bebas Konflik Indikator : Persentase Desa dan Kelurahan yang Bebas Konflik	Sasaran : Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai Indikator : Angka kasus konflik sosial	Sasaran : Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial agama Indikator : ndeks AngkaKriminalitas
2	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	Sasaran : Meningkatnya Wawasan dan pemahaman masyarakat dibidang politik Indikator : Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat	Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik Indikator : Nilai Sakip Badan Kesbangpol

B. Analisa Keberhasilan/Kegagalan, hambatan dan langkah-langkah antisipasi yang diambil

Keberhasilan kinerja Badan Kesbangpol antara lain:

1. Terjadi penurunan potensi konflik sosial, dimana tahun 2023 terjadi 5 kasus sedangkan pada tahun 2024 terjadi 2 potensi konflik. Hal ini tidak terlepas dari upaya banyak pihak baik di masyarakat, kecamatan, maupun pihak-pihak yang tergabung dalam Timdu Penanganan Konflik Sosial dalam menangani atau memediasi potensi konflik di masyarakat.
2. Salah satu Putra Daerah Kabupaten Tanah Laut berhasil lolos dalam seleksi Paskibraka Tingkat Nasional.
3. Penyaluran dana hibah untuk Pilkada serentak di Kabupaten Tanah Laut mendapat apresiasi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri



Gambar 3.22 Penghargaan atas Pembiayaan Pilkada 2024



4. Tanah laut mendapat apresiasi atas terselenggaranya Pilkada serentak dengan partisipasi pemilih tertinggi yaitu 77,52% oleh Komisi I DPRD Provinsi Kalsel.

Gambar 3.23 Penghargaan atas Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024



5. Kabupaten Tanah Laut mendapat apresiasi atas terlaksananya Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) oleh BNN
Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 3.24 Penghargaan atas Terlaksananya P4GNPN



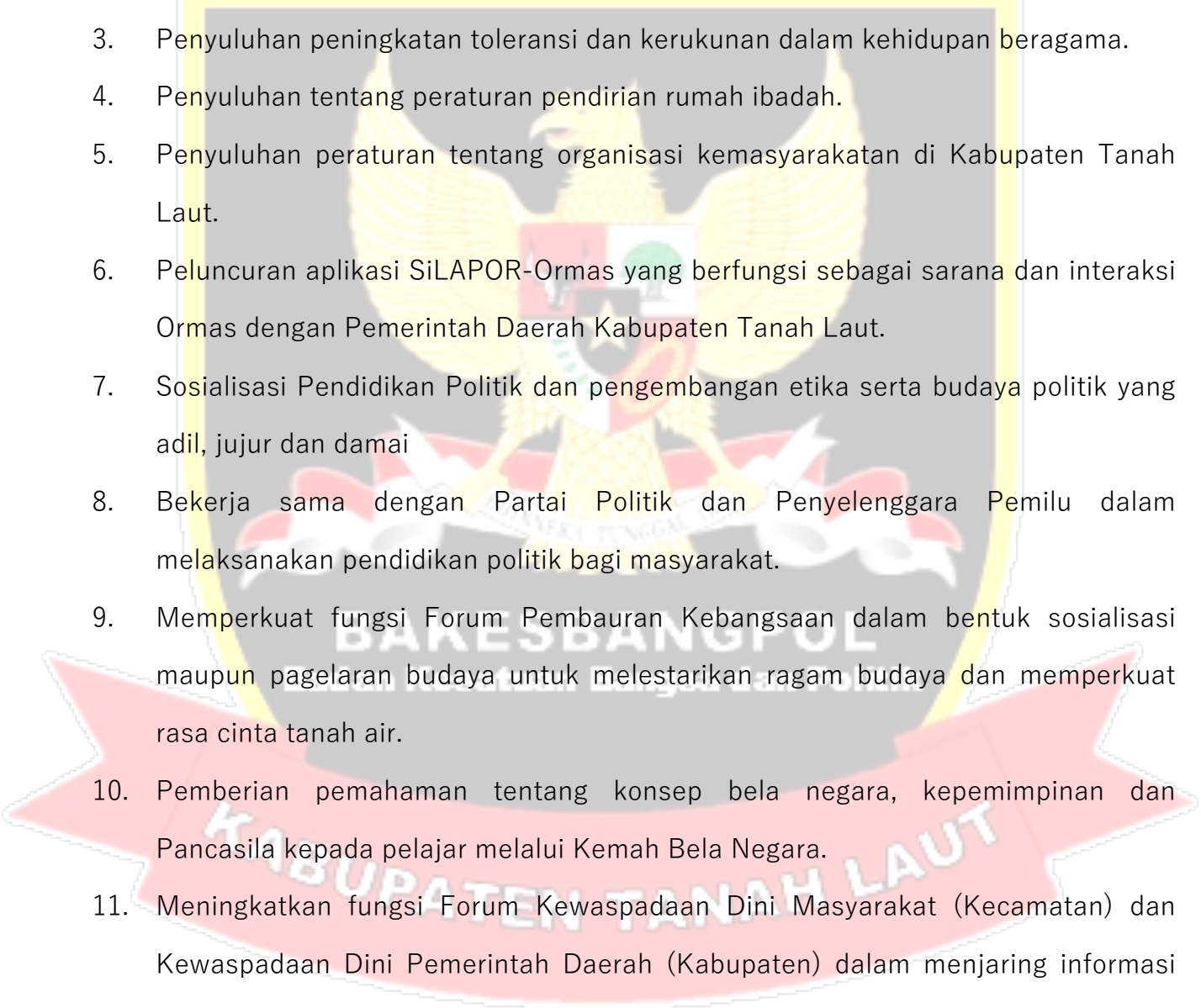
Berikut ini adalah beberapa kendala/hambatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 3.15
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sumber: Badan Kesbangpol

NO.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
			Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
			Belum terpenuhinya jumlah SDM
2	Legalitas Organisasi Kemasyarakatan belum terpenuhi	Belum seluruhnya Organisasi Masyarakat mendaftarkan serta melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan	Rendahnya pemahaman organisasi terhadap aturan tentang Organisasi Kemasyarakatan

		Politik	
3	Masih adanya penyalahgunaan Narkoba;	Rendahnya pengetahuan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba	Masyarakat enggan melaporkan dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan narkoba
4	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	Pelaksanaan bela negara belum optimal; Belum optimalnya pembauran kebangsaan
5	Menurunnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.	Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda
		Rendahnya pemahaman tujuan pencapaian 4 konsensus dasar di kalangan Generasi Muda/Pelajar	Belum maksimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar
		Rendahnya pemahaman masyarakat terkait aturan tentang pendirian rumah ibadah	Terdapat gejala intoleran antar umat beragama dan intern umat beragama
6	Sinergitas Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah belum maksimal	Belum maksimalnya fungsi Kewaspadaan Dini Daerah	Rendahnya pemahaman Kewaspadaan Dini Daerah Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik
7	Partisipasi Politik Masyarakat belum maksimal	Belum optimalnya sosialisasi, desiminasi terkait dengan Pendidikan Politik	Minimnya media/forum untuk pendidikan politik
			Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat
8	Belum terselesaikannya masalah kerawanan sosial	Masih adanya kasus kerawanan sosial yang disebabkan oleh ekonomi dan budaya	Adanya kasus sengketa lahan Adanya konflik yang disebabkan perbedaan budaya antara warga asli dan warga pendatang

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mempertahankan agar tidak terjadi konflik selama tahun 2024. Banyak upaya yang dilakukan selama Tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 
1. Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dan FKUB Kecamatan, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
 2. Penyuluhan pembinaan kepada desa-desa tentang desa peduli toleransi.
 3. Penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
 4. Penyuluhan tentang peraturan pendirian rumah ibadah.
 5. Penyuluhan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.
 6. Peluncuran aplikasi SiLAPOR-Ormas yang berfungsi sebagai sarana dan interaksi Ormas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 7. Sosialisasi Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang adil, jujur dan damai
 8. Bekerja sama dengan Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.
 9. Memperkuat fungsi Forum Pembauran Kebangsaan dalam bentuk sosialisasi maupun pagelaran budaya untuk melestarikan ragam budaya dan memperkuat rasa cinta tanah air.
 10. Pemberian pemahaman tentang konsep bela negara, kepemimpinan dan Pancasila kepada pelajar melalui Kemah Bela Negara.
 11. Meningkatkan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Kecamatan) dan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Kabupaten) dalam menjaring informasi mengenai potensi ancaman, gangguan serta hambatan di masyarakat.
 12. Melibatkan instansi vertikal dalam memediasi konflik yang terjadi.

Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar tidak terjadi konflik sosial dan konflik antarumat beragama :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik sosial dan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) Melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan BELA DESA yang dilaksanakan setiap bulan dengan materi terkait toleransi kehidupan umat beragama.

Sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya

dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai

- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan teknologi (aplikasi/web).
- e. Membangun sinergitas antara Badan Kesbangpol dengan Lembaga Vertikal.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

a. Belanja Pegawai

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai. Berikut tabel realisasi belanja tidak langsung tahun 2023 dan 2024 seperti di bawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2024

Sumber: LRA Badan Kesbangpol

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	2.598.527.940	2.186.992.061	84,16	2.633.989.739,-

2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.423.956.172	2.171.005.327	89,56	2.558.636.183,-
	Total	5.022.484.112	4.357.997.388	86,77	5.192.625.922

Belanja Pegawai tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami pengurangan sumber daya aparatur dengan pensiunnya beberapa pegawai dan tidak ada mutasi masuk pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Sedangkan untuk anggaran, pada tahun 2024 terjadi pengurangan dibandingkan dengan Tahun 2023. Terjadi kenaikan realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar 2,57% jika dibandingkan realisasi anggaran belanja pegawai pada Tahun 2023 yang realisasinya sebesar 84,20%.

a) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional keperluan Kantor dan operasional di lapangan (keperluan masyarakat agar bisa mengerti dan memahami setiap permasalahan di masyarakat itu sendiri) Berikut tabel Rekapitulasi Belanja Barang dan jasa

Tahun

2024:

Tabel.3.17

Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Sumber: SIMonev

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.702.985.601	1.407.916.195	4.477.036.2978	5.884.952.492		87,80%
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.994.835	9.270.579		9.270.579		92,75%
8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	SILPA	4.995.347	4.554.378	-	4.554.378	100,00%	91,17%
8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5 Laporan	SILPA	4.999.488	4.716.201	-	4.716.201	100,43%	94,33%
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.027.476.056	4.438.485	4.357.997.388	4.362.435.873		86,77%
8 01 01 2.02 0001	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 org/ bulan	25 org/bln	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.022.484.112	-	4.357.997.388	4.357.997.388	100,00%	86,77%
8 01 01 2.02 0003	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	4.991.944	4.438.485	-	4.438.485	100,00%	88,91%
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					37.746.000	26.400.000		26.400.000		69,94%
8 01 01 2.05 0002	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	42 Paket	SILPA	31.746.000	26.400.000	-	26.400.000	100,00%	83,16%

8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	-	SILPA	6.000.000	-	-	0,00%	0,00%
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					776.661.216	706.973.25	706.973.25		91,03%
8	01	01	2.06	0001	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	SILPA	2.984.466	2.688.708	-	2.688.708	100,00% 90,09%
8	01	01	2.06	0002	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	SILPA	209.052.336	187.928.500		187.928.500	100,00% 89,90%
8	01	01	2.06	0003	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	SILPA	9.994.220	9.003.800	-	9.003.800	100,00% 90,09%
8	01	01	2.06	0005	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	SILPA	22.683.951	18.029.994	-	18.029.994	100,00% 79,48%
8	01	01	2.06	0006	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen/ 12 bahan bacaan	6 bahan bacaan	SILPA	1.320.000	1.320.000	-	1.320.000	100,00% 100,00%
8	01	01	2.06	0007	6 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket/ Bahan Material yang disediakan	2 Paket	-	SILPA	14.973.380	14.973.380	-	14.973.380	100,00% 100,00%
8	01	01	2.06	0009	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	48 Laporan	SILPA	515.155.000	472.531.580	-	472.531.580	92,00% 91,73%
8	01	01	2.06	0010	8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	497.863	497.863	-	497.863	100,00% 100,00%
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					394.841.006	229.671.900	119.038.909	348.710.809	88,32%
8	01	01	2.07	0005	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	118 Unit	118 Unit	SILPA	118.370.280	104.474.400	-	104.474.400	100,00% 88,26%
8	01	01	2.07	0011	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	6 Unit	6 Unit	SILPA	276.470.726	125.197.500	119.038.909	244.236.409	100,00% 88,34%
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					230.266.488	208.458.947		208.458.947	90,53%
8	01	01	2.08	0002	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6 Laporan	SILPA	75.000.000	54.265.736	-	54.265.736	100,00% 72,35%

8 01 01 2.08 0004	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	SILPA	155.266.488	154.193.211	-	154.193.211	100,00%	99,31%
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						226.000.000	222.702.459		222.702.459		98,54
8 01 01 2.09 0001	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit/4 bln	SILPA	35.000.000	34.999.710	-	34.999.710	100,00%	100,00%
8 01 01 2.09 0002	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	7 unit	SILPA	176.000.000	172.909.749	-	172.909.749	100,00%	98,24%
8 01 01 2.09 0006	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	8 Unit	SILPA	15.000.000	14.793.000	-	14.793.000	100,00%	98,62%
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2.348.838.180	2.119.100.200		2.119.100.200		90,22%
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan						2.348.838.180	2.119.100.200		2.119.100.200		90,22%
8 01 02 2.01 0003	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	-	SILPA	217.391.188	210.656.500	-	210.656.500	100,00%	96,90%
8 01 02 2.01 0004	2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	275 orang	-	SILPA	475.181.663	425.535.100	-	425.535.100	100,00%	89,55%

8	01	02	2.01	0007	3	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	-	SILPA	158.048.338	149.968.000	-	149.968.000	100,00%	94,89%
8	01	02	2.01	0008	4	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	37 Orang	-	SILPA	1.367.615.879	1.209.643.000	-	1.209.643.000	100,00%	88,45%
8	01	02	2.01	0011	5	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	33 Orang	-	SILPA	130.601.112	123.297.600	-	123.297.600	100,00%	94,41%
8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					11.584.364.919	328.047.000	11.248.912.000	11.576.959.000		99,94%
8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					11.584.364.919	328.047.000	11.248.912.000	11.576.959.000		99,94%
8	01	03	2.01	0003	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1150 Orang	300 Orang	SILPA	11.474.117.289	219.910.150	11.248.912.000	11.468.822.150	100,00%	99,95%

8	01	03	2.01	0004	2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang	300 Orang	SILPA	82.990.808	81.982.000	-	81.982.000	100,00%	98,78%
8	01	03	2.01	0005	3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	-	SILPA	27.256.822	26.154.850		26.154.850	100,00%	95,96%
8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					322.499.876	7.995.550	307.500.000	315.495.550		97,83%
8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					322.499.876	7.995.550	307.500.000	315.495.550		97,83%
8	01	04	2.01	0003	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	20 orang	SILPA	322.499.876	7.995.550	307.500.000	315.495.550		97,83%

8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.331.703.825	369.712.900	925.526.850	1.295.239.750		97,26%
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.331.703.825	369.712.900	925.526.850	1.295.239.750		97,26%
8 01 05 2.01 0003	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	1110 Orang	325 Orang	SILPA	1.226.705.851	271.651.700	925.526.850	1.197.178.550	100,00%	97,59%
8 01 05 2.01 0004	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	180 Orang	20 Orang	SILPA	104.997.974	98.061.200	-	98.061.200	100,00%	93,39%
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					931.457.825	827.153.028		827.153.028		88,80%
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					931.457.825	827.153.028		827.153.028		88,80%

8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	SILPA	999.788	987.580		987.580	100,00%	98,78%
8	01	06	2.01	0001	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Orang	2 Orang	SILPA	14.710.000	7.520.860	-	7.520.860	100,00%	51,13%
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-		268.648.598	263.579.136		263.579.136	100,00%	98,11%

8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	1 Laporan	SILPA	22.099.439	14.951.000	-	14.951.000	80,00%	67,65%
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4 Dokumen	SILPA	825.000.000	540.114.452	-	540.114.452	90,00%	86,42%
						23.221.850.226	5.059.924.873	16.958.975.147	22.018.900.020		94,82%

Pelaihari, 20 Januari 2024
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 10790629 200003 1 004

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Dari tabel 3.32 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 22.018.900.020,- dari total anggaran sebesar Rp.23.221.850.226,- atau sebesar 94,82% realisasi keuangan yang terdiri dari:

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Tahun 2024

Sumber: Badan Kesbangpol

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
1.	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%		
		Program Prioritas				
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
			Rp	Rp	%	
			16.518.864.625	16.133.947.528	97,67%	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.348.838.180	2.119.100.200	90,22%		

		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	931.457.825	827.153.028	88,80%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	11.584.364.919	11.576.959.000	99,94%
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	322.499.876	315.495.550	97,83%
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.331.703.825	1.295.239.750	97,26%
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
2.	Meningkatnya	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	BB (70,25)		BB (77)

	Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
				6.702.985.601	5.884.952.492
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.702.985.601	5.884.952.492	87,80%
	Total		23.221.850.226	22.018.900.020	94,82%

Tabel 3.19
Efisiensi Sasaran Strategis

Sumber: LRA Badan Kesbangpol 2024

No	Sasaran Strategis	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
1.	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	100%	97,67%	2,33%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	99%	87,80%	11,20%

Ringkasan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dan Tahun

Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Ringkasan APBD Tahun 2023 terhadap Tahun 2024

Sumber: LRA Badan Kesbangpol 2024

No.	2023		2024	
	Jenis Belanja	Jumlah	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	4.372.348.172,00	Belanja Pegawai	4.357.997.388,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.090.757.311,00	Belanja Barang dan Jasa	4.809.566.223,00
3	Hibah (Bantuan keuangan)	48.860.760.550,00	Hibah (Bantuan keuangan)	12.405.931.600,00
4	Belanja Modal	419.385.200,00	Belanja Modal	445.404.809,00
	Total	56.743.251.233,00	Total	22.018.900.020,00

Realisasi fisik tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi keuangan terjadi penurunan sebesar 3,03%, yang mana di tahun 2024 realisasi keuangan 94,82% sedangkan realisasi keuangan pada tahun 2023 sebesar 97,85%.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

No	2023			No	2024		
	Nama Program	Nama Kegiatan / Kegiatan	Sub		Nama Program	Nama Kegiatan / Kegiatan	Sub
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Bahan/ Material				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	

					Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Penyediaan Bahan/ Material
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Pengadaan Mebel			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
		Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi			Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi

		wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan			wawasan kebangsaan,bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
					Pembentukan Paskibraka
					Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah			Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di			Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta

		Daerah			Penanganan Konflik di Daerah
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota



Tabel 3.22
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sumber: Badan Kesbangpol

	2022	2023	2024
Program	6	6	6
Kegiatan	9	12	12
Sub Kegiatan	19	32	37

Berikut kami tampilkan juga Perbandingan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Belanja
SKPD Tahun 2023 dan 2024

Sumber: LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023(Rp)	Realisasi Tahun 2024(Rp)	% Kenaikan/ Kekurangan
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA OPERASIONAL	56.323.866.033,00	21.573.495.211,00	-61,76%
	Belanja pegawai	4.372.348.172,00	4.357.997.388,00	-0,33%
	Belanja barang dan Jasa	3.090.757.311,00	4.809.566.223,00	55,61%
	Belanja Hibah	48.860.760.550,00	12.405.931.600,00	-74,61%
2	BELANJA MODAL	419.385.200,00	445.404.809,00	2,53%
	Belanja Modal	419.385.200,00	445.404.809,00	2,53%
	SURPLUS/(DEFISIT)	56.743.251.233,00	22.018.900.020,00	-61,20%

Realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebesar Rp.56.743.251.233,00 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 22.018.900.020,00, terjadi penurunan yang sangat drastis dikarenakan hibah bantuan kepada penyelenggara Pilkada lebih besar diberikan pada tahun 2023.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terjadi kekosongan di beberapa posisi Pejabat Struktural dan Pelaksana pada Badan Kesbangpol, antara lain:

Tabel 3. 24 Jabatan Kosong pada Badan Kesbangpol

Sumber: Perbup Tala Nomor 75 Tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Sekretaris	1
2	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
4	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	1
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
6	Analisis Perencanaan	1
7	Analisis Ketahanan Seni dan Budaya	1
8	Analisis Wawasan Kebangsaan	1
9	Verifikator Keuangan	1
10	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1
11	Pengelola Teknologi Informasi	1
12	Pengolah Data	4
13	Pengadministrasi Umum	3
14	Analisis Pengaduan Masyarakat	1
15	Analisis Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan	1
16	Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	1
17	Pengelola Pendidikan	1
18	Pengelola Adat dan Kesenian	1
19	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	2
20	Analisis Organisasi Masyarakat	1
21	Analisis Kerja Sama	1

Meski demikian, Badan Kesbangpol telah berusaha maksimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.

2) Sumber Daya Anggaran

Sesuai Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1311/Perenc.Makro/2024 tanggal 03 Juni 2024, Badan Kesbangpol melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas anggaran di beberapa sub kegiatan, antara lain:

Tabel 3.25 Efisiensi Anggaran Badan Kesbangpol 2024

Sumber: DPA-P TA 2024

No	Sub Kegiatan	Semula	Menjadi	Efisiensi	Keterangan
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.372.484.112	Rp5.022.484.112	Rp350.000.000	ASN Pensiun dan Kekosongan Jabatan
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 46.999.439	Rp 22.099.439	Rp 24.900.000	Anggaran Perjalanan Dinas Tidak Terlaksana

Selain efisiensi anggaran, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 188.45/01-NPHD/KUM/2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Tanah Laut untuk Kegiatan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 Pasal 6(4) bahwa PIHAK KEDUA (Polres Tanah Laut) wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KESATU (Pemerintah Daerah) melalui rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sehingga terdapat pengembalian hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26 Pengembalian Dana Hibah 2024

Sumber: LRA Badan Kesbangpol 2024

No	Uraian	Realisasi	Terpakai	Pengembalian
1	Hibah kepada Polres Tanah Laut	Rp5.700.000.000	Rp3.663.407.000	Rp2.036.593.000

Gambar 3.25 Bukti Pengembalian Dana Hibah

0239 0239053 4631 9020020 30-12-2024 13:43:22
 CASH IDR 2,036,623,000.00 Dr
 0239-01-100174-61-7 RKUD KAB TANAH LAUT IDR 2,036,593,000.00 Cr
 Charges + PPN: IDR 30,000.00
 PENGEMBALIAN DANA HIBAH PILKADA 2024
 Dest: 0070003000038 RKUD KAB TANAH LAUT PT. BPD KALIMANTAN SELATAN

PT. BPD KALIMANTAN SELATAN
 RTGS 30/12/2024
 TUNAI
 0239-01-001655-30-0
 DIKIRIM : IDR 2,036,593,000.00
 BIAYA + PPN : IDR 30,000.00
 DISETOR : IDR 2,036,623,000.00
 TERBILANG:
 DUA MILYAR TIGA PULUH ENAM
 JUTA ENAM RATUS DUA PULUH
 TIGA RIBU RUPIAH

REKENING TUJUAN : 0070003000038

PENGIRIM (Penduduk - Pemerintahan)
 RPL 168 PDHL POLRES
 JL KEMAKMURAN NO 1RT 001 001

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Sah apabila divalidasi dan dianda tarjani petugas bank.

BRI
 Melayani Dengan Setulus Hati

03

Active Band
 or a band to a



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pembuatan laporan kinerja antara lain

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 Sasaran Strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2024, rata-rata telah tercapai seluruhnya dan terlaksana dengan baik. Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah mencapai capaian realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,82%. Dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2023 sebesar 97,85% terjadi penurunan sebesar 3,03%.

Maka dapat dijelaskan bahwa untuk hasil sasaran yang tercapai ada pada sasaran yang belum mencapai 100% tetapi kegiatan telah optimal pelaksanaannya. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, karena Sumber

Daya Manusia (SDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kekurangan Tenaga yang Handal dan Kreatif sehingga beberapa kegiatan berjalan tidak sesuai yang diharapkan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi untuk mendukung peningkatan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragaman dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik social dan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) Melaksanakan program kegiatan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dengan materi 4 (empat) pilar;
- 12) Melaksanakan Pendidikan Politik bagi masyarakat dan Pengurus Partai

Politik;

- 13) Melaksanakan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
- 14) Memfasilitasi Deteksi Dini dan tes urine kepada Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- 15) Menguatkan dan mengoptimalkan kinerja Forum-forum yang telah dibentuk (FKDM, FKUB dan FPK).

Demikian laporan kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut disampaikan. Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Pelaihari, 20 Januari 2025

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah
Laut

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 10790629 200003 1 004



LAMPIRAN



Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2024

- Kabupaten

:

Tanah Laut
- Nama SKPD

:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Tugas

:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan

b. antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan

c. antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan

d. kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

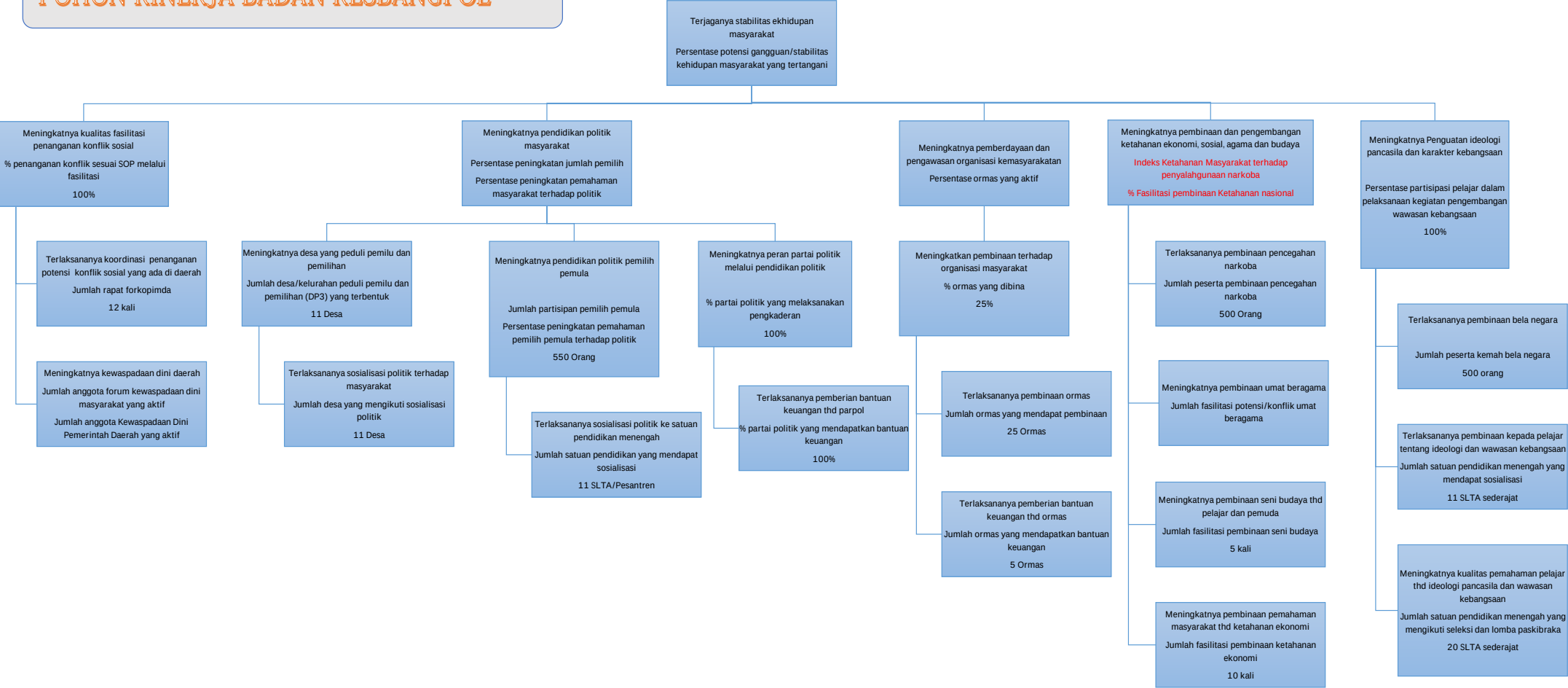
No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	(Jumlah Konflik Sosial yang tertangani/Jumlah konflik sosial yang terjadi) X 100%	Badan KESBANGPOL

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

POHON KINERJA BADAN KESBANGPOL





**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

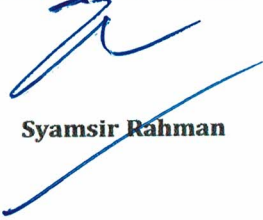
Nama : **Syamsir Rahman**
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

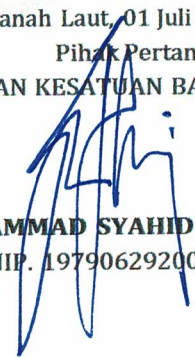
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT


Syamsir Rahman

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

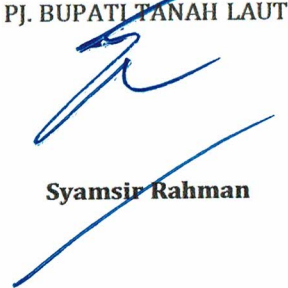

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

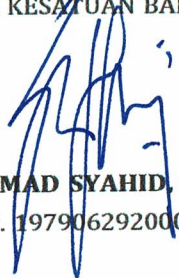
PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat		
1	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.02. Program PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. Rp 2.180.412.583,00
8.01.02.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. Rp 2.180.412.583,00
8.01.02.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. Rp 199.999.715,00
8.01.02.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. Rp 424.147.158,00
8.01.02.2.01.07. SubKegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp. Rp 108.048.415,00
8.01.02.2.01.08. SubKegiatan Pembentukan Paskibraka	Rp. Rp 1.367.615.879,00
8.01.02.2.01.11. SubKegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp. Rp 80.601.416,00
8.01.03. Program PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. Rp 11.471.246.086,00
8.01.03.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. Rp 11.471.246.086,00
8.01.03.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. Rp 11.375.997.926,00
8.01.03.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. Rp 82.990.808,00
8.01.03.2.01.05. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. Rp 12.257.352,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.04. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. Rp 322.499.876,00
8.01.05. Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. Rp 1.215.001.825,00
8.01.05.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. Rp 1.215.001.825,00
8.01.05.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. Rp 104.997.974,00
8.01.05.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. Rp 1.110.003.851,00
8.01.06. Program PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. Rp 899.227.825,00
8.01.06.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. Rp 899.227.825,00
8.01.06.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 999.788,00
8.01.06.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 14.710.000,00
8.01.06.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 211.518.598,00
8.01.06.2.01.06. SubKegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 625.000.000,00
8.01.06.2.01.05. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 46.999.439,00

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT

Syamsir Rahman

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
Plt. SEKRETARIS

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

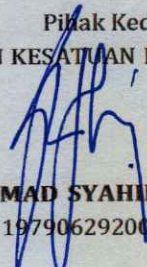
PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan		
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1 Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	24

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. Rp 6.646.125.647,00
8.01.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 9.994.835,00
8.01.01.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. Rp 4.995.347,00
8.01.01.2.01.07. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 4.999.488,00
8.01.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Rp 5.377.476.056,00
8.01.01.2.02.01. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. Rp 5.372.484.112,00
8.01.01.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. Rp 4.991.944,00
8.01.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. Rp 37.746.000,00
8.01.01.2.05.02. SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. Rp 31.746.000,00
8.01.01.2.05.09. SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. Rp 6.000.000,00
8.01.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. Rp 548.514.599,00
8.01.01.2.06.01. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. Rp 2.984.466,00
8.01.01.2.06.02. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. Rp 138.115.033,00
8.01.01.2.06.03. SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. Rp 9.994.220,00
8.01.01.2.06.05. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. Rp 20.474.637,00
8.01.01.2.06.06. SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. Rp 1.320.000,00
8.01.01.2.06.07. SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. Rp 9.973.380,00
8.01.01.2.06.10. SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. Rp 497.863,00
8.01.01.2.06.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. Rp 365.155.000,00
8.01.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. Rp 216.127.669,00
8.01.01.2.07.05. SubKegiatan Pengadaan Mebel	Rp. Rp 19.576.943,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.01.2.07.11. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 196.550.726,00
8.01.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 230.266.488,00
8.01.01.2.08.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. Rp 75.000.000,00
8.01.01.2.08.04. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. Rp 155.266.488,00
8.01.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 226.000.000,00
8.01.01.2.09.01. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. Rp 35.000.000,00
8.01.01.2.09.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 176.000.000,00
8.01.01.2.09.06. SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 15.000.000,00

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
Plt. SEKRETARIS


Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDI RUKMANA, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024

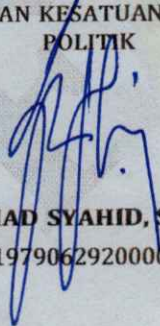
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

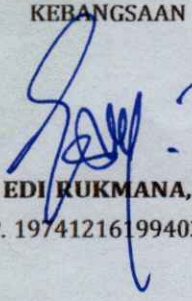
EDI RUKMANA, SE
NIP. 197412161994031003

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		
	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
	1	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	% 10

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.02. Program PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. Rp 2.180.412.583,00
8.01.02.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. Rp 2.180.412.583,00
8.01.02.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. Rp 199.999.715,00
8.01.02.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. Rp 424.147.158,00
8.01.02.2.01.07. SubKegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp. Rp 108.048.415,00
8.01.02.2.01.08. SubKegiatan Pembentukan Paskibraka	Rp. Rp 1.367.615.879,00
8.01.02.2.01.11. SubKegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp. Rp 80.601.416,00

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

EDI RUKMANA, SE
NIP. 197412161994031003



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG POLITIK

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat		
	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	1	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	%100
	2	Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi	Satuan Pendidikan11

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.03. Program PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. Rp 11.471.246.086,00
8.01.03.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. Rp 11.471.246.086,00
8.01.03.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. Rp 11.375.997.926,00
8.01.03.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. Rp 82.990.808,00
8.01.03.2.01.05. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. Rp 12.257.352,00

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG POLITIK

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSTINA, SKM, M.Ling
Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA,
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA,
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

YUSTINA, SKM, M.Ling
NIP. 197905221998032002

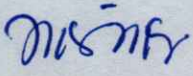
PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	1	Persentase ormas yang aktif	% 25
2	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya		
	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
	1	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Indeks 75

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.04. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. Rp 322.499.876,00
8.01.05. Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. Rp 1.215.001.825,00
8.01.05.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. Rp 1.215.001.825,00
8.01.05.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. Rp 104.997.974,00
8.01.05.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. Rp 1.110.003.851,00

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

YUSTINA, SKM, M.Ling
NIP. 197905221998032002



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. KAMARUZZAMAN**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Drs. H. KAMARUZZAMAN
NIP. 196708031993031004

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
	1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	1	Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitas	% 100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.06. Program PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. Rp 899.227.825,00
8.01.06.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. Rp 899.227.825,00
8.01.06.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 999.788,00
8.01.06.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 14.710.000,00
8.01.06.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 211.518.598,00
8.01.06.2.01.06. SubKegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp 625.000.000,00
8.01.06.2.01.05. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. Rp 46.999.439,00

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Drs. H. KAMARUZZAMAN
NIP. 196708031993031004



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI ZAKIAH, SE**
Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SITI ZAKIAH, SE
NIP. 197007011992032010

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

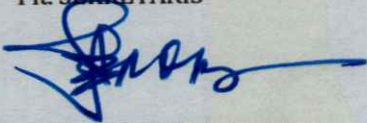
NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Nilai IKM Sekretariat			Rp 37.746.000,00
	1 Kegiatan : 8.01.01.2.05 - Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah			
	1 Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	
2	Nilai IKM Sekretariat			Rp 548.514.599,00
	2 Kegiatan : 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum PerangkatDaerah			
	1 Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian	%	100	
3	Nilai IKM Sekretariat			Rp 216.127.669,00
	3 Kegiatan : 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah			
	1 Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	
4	Nilai IKM Sekretariat			Rp 230.266.488,00
	4 Kegiatan : 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah			
	1 Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	
5	Nilai IKM Sekretariat			Rp 226.000.000,00
	5 Kegiatan : 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Tersedianya Pakain dinas beserta atribut kelengkapannya			Rp 31.746.000,00
	1 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	51	
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Rp 6.000.000,00
	2 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	
3	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Rp 2.984.466,00
	3 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 138.115.033,00
	4 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			Rp 9.994.220,00
	5 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			Rp 20.474.637,00
	6 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Rp 1.320.000,00
	7 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1	
8	Tersedianya Bahan/ Material			Rp 9.973.380,00
	8 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.07 - Penyediaan Bahan/Material			
	1 Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	
9	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Rp 497.863,00
	9 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	
10	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 365.155.000,00
	10 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	
11	Tersedianya Mebel			Rp 19.576.943,00
	11 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel			
	1 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 196.550.726,00
	12 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 75.000.000,00
	13 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 155.266.488,00
	14 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
15	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Rp 35.000.000,00
	15 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	
16	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Rp 176.000.000,00
	16 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	
17	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Rp 15.000.000,00
	17 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS



Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Tanah Laut, 01 Juli 2024
Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SITI ZAKIAH, SE
NIP. 197007011992032010



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IKHWATUN HASANAH, SE**
Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

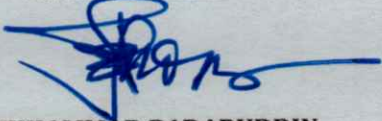
IKHWATUN HASANAH, SE
NIP. 199301072022032005

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Nilai IKM Sekretariat				Rp 9.994.835,00
	1	Kegiatan : 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	
2	Nilai IKM Sekretariat				Rp 5.377.476.056,00
	2	Kegiatan : 8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	ersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp 4.995.347,00
	1	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	7	
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 4.999.488,00
	2	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				Rp 5.372.484.112,00
	3	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Rp 4.991.944,00
	4	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS



Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



IKHWATUN HASANAH, SE
NIP. 199301072022032005



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP., M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Syamsir Rahman**
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT

Syamsir Rahman

Tanah Laut, 19 September 2024
Pihak Pertama
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat		
1	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.07. Program PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 2.348.838.180,00
8.01.02.2.02. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 2.348.838.180,00
8.01.02.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 217.391.188,00
8.01.02.2.02.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 475.181.663,00
8.01.02.2.01.09. SubKegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp 158.048.338,00
8.01.02.2.01.10. SubKegiatan Pembentukan Paskibraka	Rp 1.367.615.879,00
8.01.02.2.01.11. SubKegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp 130.601.112,00
8.01.08. Program PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 11.584.364.919,00
8.01.03.2.02. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 11.584.364.919,00
8.01.03.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 11.474.117.289,00
8.01.03.2.02.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 82.990.808,00
8.01.03.2.02.05. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 27.256.822,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.01.09. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 322.499.876,00
8.01.10. Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 1.331.703.825,00
8.01.05.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 1.331.703.825,00
8.01.05.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 104.997.974,00
8.01.05.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 1.226.705.851,00
8.01.11. Program PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 931.457.825,00
8.01.06.2.02. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 931.457.825,00
8.01.06.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 999.788,00
8.01.06.2.01.06. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 14.710.000,00
8.01.06.2.01.07. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 268.648.598,00
8.01.06.2.01.06. SubKegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 625.000.000,00
8.01.06.2.01.08. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 22.099.439,00

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT

Syamsir Rahman

Pihak Pertama
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

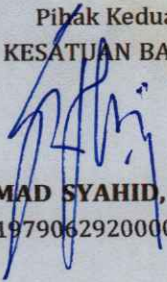
Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 19 September 2024
Pihak Pertama
Plt. SEKRETARIS


Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil survei pelayanan kesekretariat	90

KEGIATAN

8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	9.994.835,00
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.027.476.056,00
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	37.746.000,00
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	776.661.216,00
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	394.841.006,00
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	230.266.488,00
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	226.000.000,00

ANGGARAN

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 19 September 2024
Pihak Pertama
Pit. SEKRETARIS

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

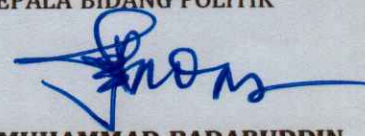
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 19 September 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG POLITIK


Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat		
	1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
	1 Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	%	100
	2 Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi	Satuan Pendidikan	11

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

8.01.03. Program PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	11.584.364.91,00
8.01.03.2.02. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp	11.584.364.91,00
8.01.03.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp	11.474.117.289,00
8.01.03.2.02.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp	82.990.808,00
8.01.03.2.02.05. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp	27.256.822,00

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG POLITIK

Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSTINA, SKM, M.Ling**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA,
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA,
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

YUSTINA, SKM, M.Ling
NIP. 197905221998032002

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	1	Persentase ormas yang aktif	% 25
2	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya		
	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
	1	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Indeks 75

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

Program PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 322.499.876,00
8.01.04.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 322.499.876,00
8.01.06. Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 1.331.703.825,00
8.01.05.2.02. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 1.331.703.825,00
8.01.05.2.01.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 104.997.974,00
8.01.05.2.01.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 1.226.705.851,00

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

YUSTINA, SKM, M.Ling
NIP. 197905221998032002



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WARDANA, SE**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Pertama

Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Pihak Kedua

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 197906292000031004

WARDANA, SE

NIP. 197303101994031011

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
	1 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
	1 Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitas	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

8.01.06. Program PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 931.457.825,00
8.01.06.2.02. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 931.457.825,00
8.01.06.2.02.01. SubKegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 999.788,00
8.01.06.2.01.05. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 14.710.000,00
8.01.06.2.01.06. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 268.648.598,00
8.01.06.2.01.06. SubKegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 625.000.000,00
8.01.06.2.01.05. SubKegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 22.099.439,00

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Pihak Pertama
Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

WARDANA, SE
NIP. 197303101994031011



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDI RUKMANA, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 197906292000031004

Tanah Laut, 19 September 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

EDI RUKMANA, SE
NIP. 197412161994031003

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		
	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
	1	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	% 10

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

8.01.02. Program PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	2.348.838.180,00
8.01.02.2.02. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	2.348.838.180,00
8.01.02.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp	217.391.188,00
8.01.02.2.02.04. SubKegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp	475.181.663,00
8.01.02.2.01.09. SubKegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp	158.048.338,00
8.01.02.2.01.10. SubKegiatan Pembentukan Paskibraka	Rp	1.367.615.879,00
8.01.02.2.01.11. SubKegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp	130.601.112,00

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 197906292000031004

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

EDI RUKMANA, SE

NIP. 197412161994031003



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IKHWATUN HASANAH, SE**
Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

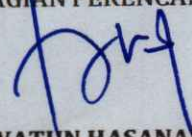
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS


Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN


IKHWATUN HASANAH, SE
NIP. 199301072022032005

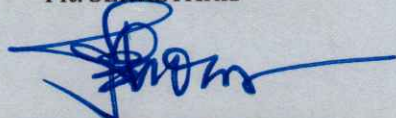
PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Nilai IKM Sekretariat				Rp 9.994.835,00
	1	Kegiatan : 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	
2	Nilai IKM Sekretariat				Rp 5.027.476.056,00
	2	Kegiatan : 8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp 4.995.347,00
	1	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	7	
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 4.999.488,00
	2	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				Rp 5.022.484.112,00
	3	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Rp 4.991.944,00
	4	Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	

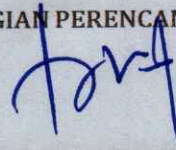
Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS



Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



IKHWATUN HASANAH, SE
NIP. 199301072022032005



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI ZAKIAH, SE**
Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

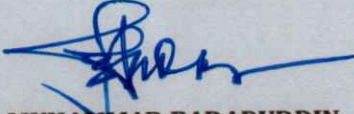
Nama : **Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS


Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SITI ZAKIAH, SE
NIP. 197007011992032010

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Nilai IKM Sekretariat			Rp 37.746.000,00
	1 Kegiatan : 8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1 Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	
2	Nilai IKM Sekretariat			Rp 776.661.216,00
	2 Kegiatan : 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1 Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian	%	100	
3	Nilai IKM Sekretariat			Rp 394.841.006,00
	3 Kegiatan : 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1 Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	
4	Nilai IKM Sekretariat			Rp 230.266.488,00
	4 Kegiatan : 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	
5	Nilai IKM Sekretariat			Rp 226.000.000,00
	5 Kegiatan : 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	

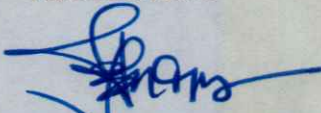
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Tersedianya Pakain dinas beserta atribut kelengkapannya			Rp 31.746.000,00
	1 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	51	
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Rp 6.000.000,00
	2 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	
3	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Rp 2.984.466,00
	3 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 209.052.336,00
	4 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			Rp 9.994.220,00
	5 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			Rp 22.683.951,00
	6 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Rp 1.320.000,00
	7 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1	
8	Tersedianya Bahan/ Material			Rp 14.973.380,00
	8 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.07 - Penyediaan Bahan/Material			
	1 Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	
9	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Rp 497.863,00
	9 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	
10	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 515.155.000,00
	10 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	
11	Tersedianya Mebel			Rp 118.370.280,00
	11 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel			
	1 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	118	
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 276.470.726,00
	12 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 75.000.000,00
	13 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 155.266.488,00
	14 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
15	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Rp 35.000.000,00
15	<i>Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>			
1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	
16	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Rp 176.000.000,00
16	<i>Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>			
1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	
17	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Rp 15.000.000,00
17	<i>Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			
1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua
Plt. SEKRETARIS



Drs. H. MUHAMMAD BADARUDDIN
NIP. 197211061991011001

Pihak Pertama
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SITI ZAKIAH, SE
NIP. 197007011992032010

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1 2024
Januari - Maret



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut
Laporan Kinerja Triwulan 1
Januari – Maret Tahun 2024**

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase Potensi Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Tertangani	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai LKj	BB	

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24	
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12	
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil survei pelayanan kesekretariat	90	



PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	13,94%
2		Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	21,99%

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

II	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan						
No	Indikator	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1 Dokumen	20%	4.995.347	0	0%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 Laporan	28,57%	4.999.488	1.392.816	27,86%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	26 Orang/bulan	74,28%	5.372.484.112	1.179.183.106	21,95%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	60%	4.991.944	3.393.485	67,98%
Total					5.387.470.891	1.183.969.407	21,98%

PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	13,91%
2.		Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian	100%	38,04%
3.		Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	18,42%
4.		Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	22,23%
5.		Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15,63%

UMPEG

I Kasubbag Umum dan Kepegawaian							
No.	Indikator	Target	Realisasi TW 1	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61 Paket	15 Paket	24,59%	31.746.000	5.250.000	16,54%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	-	0%	6.000.000	-	0%

3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	-	100%	2.984.466	-	0%
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket	7 Paket	87,5%	138.115.033	112.093.500	81,16%
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	-	0%	9.994.220	-	57%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	-	0%	20.474.637	1.862.900	9,10%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen (12 Bulan)	1 Dokumen (3 Bulan)	25%	1.320.000	330.000	25%
9.	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	-	0%	9.973.380	-	0%
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	17 Laporan	17%	365.155.000	94.371.158	25,84%
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	-	0%	497.863	-	0%
12.	Pengadaan Mebel	6 Unit	-	0%	19.576.943	-	0%
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	0%	196.550.726	39.800.000	20,25%
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3 Laporan	25%	75.000.000	13.427.559	17,90%
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3 Laporan	25%	155.266.488	37.760.430	24,32%
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit (12 Bulan)	1 unit (3 Bulan)	25%	35.000.000	4.252.500	12,15%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	18 Unit	4 Unit	22,22%	176.000.000	29.150.850	16,56%

	Operasional atau Lapangan						
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	2 Unit	8,69%	15.000.000	1.910.000	12,73%
	Total				1.258.654.756	340.208.897	27,03%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Pengerjaan paving blok (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) belum dilaksanakan karena belum selesai dalam proses administrasi	Berkoordinasi dengan PABJ dan kontraktor	Pada triwulan berikutnya	-



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	10%	

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 1	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	-	0%	199.999.715	-	0%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	275 Orang	-	0%	424.147.158	-	0%
3.	Pembinaan terhadap aktifitas ke Paskibrakaan dan Purna Paskibraka	1 Dokumen	-	0%	108.048.415	10.000.000	9,26%
4.	Pembentukan Paskibraka	37 Orang	-	0%	1.367.615.879	-	0%
5.	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	33 Orang	-		80.601.416	-	0%
	Total				2.180.412.583	10.000.000	0,46%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Kekurangan SDM guna menunjang percepatan administrasi (SPJ)	Administrasi dilakukan secara bertahap	Pada triwulan berikutnya	
2.	Gedung Diklat Loka Bina Praja yang akan digunakan sebagai tempat diklat Paskibraka pada Juli-Agustus terpakai.	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah / SKPD lainnya	Pada triwulan berikutnya	



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	100%	
		Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi	11 Satuan Pendidikan	

No	Indikator	Target	Realisasi TW 1	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1150 Orang	50 Orang	4,35%	11.375.997.926	5.713.240.000	50,22%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	550 Orang	250 Orang	45,45 %	82.990.808	36.615.000	44,12%
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	2 Laporan	-	0%	12.257.352	3.665.000	29,90%

	Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah						
	Total				11.471.246.086	5.753.520.000	50,16%

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	25%	-
2.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	75	-

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 1	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	-	0%	322.499.876	-	0%
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	1110 Orang	50 Orang	4,50%	1.110.003.851	83.091.250	7,49%

4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180 Orang	-	0%	104.997.974	-	0%
	Total				1.537.501.701	83.091.250	5,40%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Hibah Barang belum dapat disalurkan	Koordinasi dengan penerima hibah (BNN), PBJ, dan Penyedia untuk kemudian dilakukan survey.	Pada triwulan berikutnya	

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitas	100%	-

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 1	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	-	0%	999.788	-	0%
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	3 Orang	2 Orang	66,67%	14.710.000	7.520.860	51,13%
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-	0%	211.518.598	540.000	0,26%
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	-	0%	46.999.439	1.815.000	3,86%

5.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokumen	16,67%	625.000.000	24.200.000	3,87%
	Total				899.227.825	34.075.860	3,79%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Mediasi Batas wilayah antara Desa Batalang dan Damit Hulu Kec.Batu Ampar belum mendapat kejelasan/kepastian	Berkoordinasi dengan DPMD, Kecamatan dan masyarakat Desa untuk dilakukan peninjauan ke lapangan	Pada triwulan berikutnya	-



KESIMPULAN

A. Catatan :

- Secara keseluruhan capaian realisasi keuangan triwulan 1 pada Badan Kesbangpol sudah baik dan melampaui target yang telah ditetapkan (32,57%)
- Realisasi anggaran pada Bidang Sekretariat hingga triwulan 1 telah tercapai 22,93%.
- Presentase realisasi anggaran Bidang Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan baru mencapai 0,46%. Ini adalah realisasi terendah dari semua Bidang
- Bidang Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan pada saat ini sedang fokus melaksanakan seleksi Paskibraka 2024 dan tahapannya akan dilanjutkan setelah libur Idul Fitri
- Realisasi anggaran pada Bidang Ketahanan dengan 2 Program Kegiatan yaitu 5,40%.
- Bidang Ketahanan masih akan melakukan sosialisasi Perda 3 Tahun 2022 (P4GNPN) untuk kecamatan setelah libur Idul Fitri
- Secara keseluruhan realisasi Bidang Politik telah mencapai 50,16% dan menjadi realisasi tertinggi dari semua Bidang
- Bidang Politik telah melaksanakan pencairan hibah keamanan Pilkada kepada Polres Tala, sedangkan untuk Korem Antasari masih menunggu proses pembuatan rekening.
- Secara keseluruhan realisasi Bidang Kewaspadaan Nasional telah mencapai 3,79%.
- Forkopimda yang dilaksanakan pada triwulan I sebanyak 2 kali dan masih menunggu instruksi pimpinan untuk pelaksanaan rapat selanjutnya

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790629 20003 1 004

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 2 2024

April - Juni



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut
Laporan Kinerja Triwulan 2
April – Juni Tahun 2024**

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase Potensi Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Tertangani	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai LKj	BB	BB

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	22,50
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24	22,50
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12	12
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	20
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil survei pelayanan kesekretariat	90	

PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	72,99%
2		Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	45,59%

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

II	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan						
No	Indikator	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	4.995.347	4.154.378	83,16%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5 Laporan	71,43%	4.999.488	3.141.201	62,83%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	25 Orang/bulan	71,43%	5.372.484.112	2.447.618.465	45,56%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	60%	4.991.944	4.188.485	83,90%
Total					5.387.470.891	2.451.806.950	45,59%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Terjadi pengurangan jumlah Pegawai dikarenakan telah memasuki masa purna tugas	Berkoordinasi dengan BKPSDM	Menunggu pemetaan kebutuhan pegawai	



PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	53,25%
2.		Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian	100%	57,69%
3.		Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	87,63%
4.		Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	44,67%
5.		Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	34,59%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KABUPATEN TANAH LAUT

UMPEG

I Kasubbag Umum dan Kepegawaian							
No.	Indikator	Target	Realisasi TW 2	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61 Paket	42 Paket	68,85%	31.746.000	20.100.000	63,32%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	-	0%	6.000.000	-	0%
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	2.984.466	2.688.708	90,09%
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket	7 Paket	87,5%	138.115.033	112.593.500	81,52%
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	1 Paket	50%	9.994.220	4.488.632	44,91%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	2 Paket	54%	20.474.637	11.022.588	53,84%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen (12 Bulan)	1 Dokumen (6 Bulan)	50%	1.320.000	660.000	50%
9.	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	-	0%	9.973.380	-	0%
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	51 Laporan	51%	365.155.000	184.505.656	50,53%
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	497.863	497.863	100%
12.	Pengadaan Mebel	12 Unit	10 Unit	88%	19.576.943	17.159.700	87,65%
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	88%	196.550.726	172.236.409	87,63%

14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6 Laporan	50%	75.000.000	25.771.951	34,36%
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	6 Laporan	50%	155.266.488	77.096.607	49,65%
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit (12 Bulan)	1 unit (6 Bulan)	50%	35.000.000	10.935.475	12,15%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	7 Unit	38,89%	176.000.000	60.935.475	34,62%
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	8 Unit	42,00%	15.000.000	6.293.000	41,95%
Total					1.258.654.756	706.985.089	56,17%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Pengadaan Pakaian Dinas untuk Bidang Ketahanan sedang dalam proses	Berkoordinasi dengan penyedia	Pada triwulan berikutnya	-

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	10%	

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 2	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	-	0%	199.999.715	-	0%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	275 Orang	-	0%	424.147.158	2.900.000	0,68%
3.	Pembinaan terhadap aktifitas ke Paskibrakaan dan Purna Paskibraka	1 Dokumen	-	0%	108.048.415	11.600.000	10,74%
4.	Pembentukan Paskibraka	37 Orang	-	0%	1.367.615.879	112.780.000	8,25%
5.	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	33 Orang	-	0%	80.601.416	3.200.000	3,97%
	Total				2.180.412.583	130.480.000	5,98%

No	Kendala yang dihadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Kekurangan SDM guna menunjang percepatan administrasi (SPJ)	Administrasi dilakukan secara bertahap	Pada triwulan berikutnya	
2.	Gedung Diklat Loka Bina Praja yang akan digunakan sebagai tempat diklat Paskibraka pada Juli-Agustus terpakai.	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah / SKPD lainnya	Pada triwulan berikutnya	
3.				



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	100%	
		Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi	11 Satuan Pendidikan	

No	Indikator	Target	Realisasi TW 2	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1150 Orang	1070 Orang	93%	11.375.997.926	10.540.455.500	92,66%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	550 Orang	450 Orang	54,00%	82.990.808	44.787.000	53,97%
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan	2 Laporan	1 Laporan	50%	12.257.352	4.260.000	34,75%

	Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah						
	Total				11.471.246.086	10.589.502.500	92,31%

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	25%	-
2.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	75	-

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 2	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	80 Orang	100%	322.499.876	307.500.000	95,35%
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	1110 Orang	325 Orang	29,28%	1.110.003.851	120.696.250	10,87%

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.						
4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180 Orang	138 Orang	76%	104.997.974	78,875.000	75,12%
	Total				1.537.501.701	507.071.250	32,98%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Hibah Barang belum dapat disalurkan	Terjadi pergantian penyedia karena penyedia yang semula tidak dapat memenuhi tenggat yang telah ditentukan.	Pada triwulan berikutnya	

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitasi	100%	-

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 2	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	-	0%	999.788	-	0%
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	3 Orang	2 Orang	66,67%	14.710.000	7.520.860	51,13%
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	40 Orang	20%	211.518.598	37.409.784	17,69%
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	4 Laporan	2 Laporan	50%	46.999.439	5,225,000	11,12%

	serta Penanganan Konflik di Daerah						
5.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4 Dokumen	33,33%	625.000.000	186.587.361	29,85%
	Total				899.227.825	236.743.005	26,33%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Terdapat laporan tentang WNA yang habis masa berlaku visanya	Berkoordinasi dengan Imigrasi kelas 1 Banjarmasin	Pada triwulan berikutnya	-



KESIMPULAN

A. Catatan :

- Secara keseluruhan capaian realisasi keuangan triwulan 2 pada Badan Kesbangpol sudah baik dan melampaui target yang telah ditetapkan (64,36%)
- Realisasi anggaran pada Bidang Sekretariat hingga triwulan 2 telah tercapai 47,64%.
- Presentase realisasi anggaran Bidang Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan baru mencapai 5,98%.
- Bidang Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan pada saat ini sedang fokus melaksanakan seleksi Paskibraka 2024 untuk provinsi dan tahapannya akan dilanjutkan dengan pemusatan Pendidikan dan Pelatihan
- Bidang Ketahanan masih akan melakukan sosialisasi Perda 3 Tahun 2022 (P4GNPN) untuk kecamatan untuk kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Pendirian Rumah Ibadah yang bekerjasama dengan FKUB Tanah Laut
- Secara keseluruhan realisasi Bidang Politik telah mencapai 92,31% dan menjadi realisasi tertinggi dari semua Bidang
- Bidang Politik telah melaksanakan pencairan hibah keamanan Pilkada kepada Korem Antasari dan juga hibah kepada Partai Politik..
- Sosialisasi Pilkada serentak masih terus dilaksanakan di sekolah-sekolah dan kecamatan.
- Secara keseluruhan realisasi Bidang Kewaspadaan Nasional telah mencapai 26,33%.
- Forkopimda yang dilaksanakan pada triwulan II sebanyak 4 kali dan masih menunggu instruksi pimpinan untuk pelaksanaan rapat selanjutnya

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790629 20003 1 004

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 3 2024
Juli-September



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut
Laporan Kinerja Triwulan 3
Juli-September Tahun 2024**

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase Potensi Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Tertangani	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai LKj	BB	BB

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	22,50
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24	22,50
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12	12
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	20
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil survei pelayanan kesekretariat	90	



PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	72,99%
2		Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	66,84%

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

II Kasubbag Perencanaan dan Keuangan							
No	Indikator	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	4.995.347	4.154.378	83,16%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5 Laporan	71,43%	4.999.488	3.141.201	62,83%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	24 Orang/bulan	71,43%	5.022.484.112	3.356.021.577	66,82%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	90%	4.991.944	4.188.485	83,90%
Total					5.037.470.891	3.367.505.641	66,85%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Terjadi pengurangan jumlah Pegawai dikarenakan telah memasuki masa purna tugas	Berkoordinasi dengan BKPSDM	Menunggu pemetaan kebutuhan pegawai	

PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	69,94%
2.		Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian	100%	54,80%
3.		Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	47,97%
4.		Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	61,57%
5.		Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	59,71%

BAKESBANGPOL
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KABUPATEN TANAH LAUT

UMPEG

I Kasubbag Umum dan Kepegawaian							
No.	Indikator	Target	Realisasi TW 3	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61 Paket	57 Paket	93,44%	31.746.000	26.400.000	83,16%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	-	0%	6.000.000	-	0%
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	2.984.466	2.688.708	90,09%
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	7 Paket	70%	209.052.336	119.249.500	57,04%
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	100%	9.994.220	9.003.800	90,09%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	3 Paket	75%	22.683.951	14.414.710	63,55%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen (12 Bulan)	1 Dokumen (9 Bulan)	75%	1.320.000	990.000	75%
9.	Penyediaan Bahan/Material	2 Paket	-	0%	14.973.380	-	0%
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	66 Laporan	66%	515.155.000	281.267.246	54,60%
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	497.863	497.863	100%
12.	Pengadaan Mebel	118 Unit	12 Unit	88%	118.370.280	17.159.700	14,50%
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	3 Unit	50%	276.470.726	172.236.409	62,30%

14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	9 Laporan	75%	75.000.000	38.917.500	51,89%
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	9 Laporan	75%	155.266.488	102.857.034	66,25%
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit (12 Bulan)	1 unit (9 Bulan)	75%	35.000.000	21.285.000	60.81%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	8 Unit	38,89%	176.000.000	104.014.262	59,10%
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	13 Unit	56,52%	15.000.000	9.643.000	64,29%
Total					1.665.514.710	920.624.732	55,19%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Pengadaan mebel (kursi aula, gazebo dan kanopi) sedang dalam proses pemesanan ke penyedia	Berkoordinasi dengan penyedia	Pada triwulan berikutnya	-

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	10%	

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 3	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	-	0%	217.391.188	665.000	0,31%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	350 Orang	96 Orang	27,42%	475.181.663	29.280.000	6,16%
3.	Pembinaan terhadap aktifitas ke Paskibrakaan dan Purna Paskibraka	1 Dokumen	-	18%	158.048.338	19.185.000	12,14%
4.	Pembentukan Paskibraka	37 Orang	-	75%	1.367.615.879	959.800.000	70,18%
5.	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	33 Orang	-	34%	130.601.112	44.310.000	33,93%
	Total				2.348.838.180	1.037.240.000	44,16%

No	Kendala yang dihadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Kekurangan SDM guna menunjang percepatan administrasi (SPJ)	Administrasi dilakukan secara bertahap	Pada triwulan berikutnya	
2.	Beberapa kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa (kemah bela Negara dan pagelaran budaya) diundur pelaksanaannya karena rentan bersinggungan atau menjadi komoditas politik.	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, SKPD serta pihak lainnya	Pada triwulan berikutnya	
3.				



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	100%	
		Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi	11 Satuan Pendidikan	

No .	Indikator	Target	Realisasi TW 3	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1150 Orang	1150 Orang	93%	11.474.117.289	10.624.190.500	92,59%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	550 Orang	541 Orang	98,36%	82.990.808	72.092.000	86.87%
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan	2 Laporan	1 Laporan	50%	27.256.822	4.260.000	15,63%

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah						
	Total				11.584.364.919	10.700.542.500	92,37%

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	25%	-
2.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	75	-

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 3	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	80 Orang	100%	322.499.876	307.500.000	95,35%
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	1110 Orang	325 Orang	29,28%	1.226.705.851	201.086.250	16,39%

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.						
4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180 Orang	140 Orang	77,78%	104.997.974	81.278.200	77,41%
	Total				1.654.203.701	589.864.450	35,66%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Hibah Barang masih dalam proses perizinan kepada Kemenhub	Koordinasi dengan UKPBJ dan Penyedia.	Pada triwulan berikutnya	

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitasi	100%	-

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 3	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	70%	999.788	699.580	69,97%
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	3 Orang	2 Orang	66,67%	14.710.000	7.520.860	51,13%
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	520 Orang	315 Orang	60,58%	268.648.598	117.059.352	43,57%
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	2 Laporan	50%	22.099.439	7.565.000	34,23%

5.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	8 Dokumen	60%	625.000.000	305.867.561	48,94%
	Total				931.457.825	438.712.353	47,10%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Mediasi Batas wilayah antara Desa Batalang dan Damit Hulu Kec.Batu Ampar belum mendapat kejelasan/kepastian	Berkoordinasi dengan DPMD, Kecamatan dan masyarakat Desa untuk dilakukan peninjauan ke lapangan	Pada triwulan berikutnya	-



KESIMPULAN

A. Catatan :

- Secara keseluruhan capaian realisasi keuangan triwulan 3 pada Badan Kesbangpol sudah baik dan melampaui target yang telah ditetapkan (73,43%)
- Penambahan pada pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 487.336.384
- Hibah Barang masih dalam tahap perizinan kepada Kemenhub, proses pembuatan 75%
- Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan telah selesai disalurkan (3 Ormas)
- Sosialisasi pendidikan politik masih terus dilakukan menjelang Pilkada serentak

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

Pemula Tk. I (IV/b)

NIP. 19790629 20003 1 004

BAKESBANGPOL
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 4 2024
Oktober-Desember



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut
Laporan Kinerja Triwulan 4
Oktober-Desember Tahun 2024**

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase Potensi Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Tertangani	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai LKj	BB	BB

$$= \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus Sosial yang terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ Kasus}}{2 \text{ Kasus}} \times 100\%$$

KABUPATEN TANAH LAUT

No	Konflik	Tempat Kejadian Konflik
1	Dugaan penghinaan terhadap Guru Sekumpul yang dilakukan oleh seorang ASN di media sosial	Desa Padang Luas, Kurau
2	Penggunaan Musholla warga RT 10 Kelurahan Pabahanan bersamaan dengan jamaah Salafi	Kelurahan Pabahanan, Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	22,50
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	24	22,50
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	12	12
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	20
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Hasil survei pelayanan kesekretariat	90	87,34

PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	72,99%
2		Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	66,84%

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

II Kasubbag Perencanaan dan Keuangan							
No	Indikator	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	4.995.347	4.554.378	91,17%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100%	4.999.488	4.716.201	94,33%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	24 Orang/bulan	71,43%	5.022.484.112	4.357.997.388	86,77%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	90%	4.991.944	4.438.485	88,91%
Total					5.037.470.891	4.371.706.452	86,78%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Terjadi pengurangan jumlah Pegawai dikarenakan telah memasuki masa purna tugas	Berkoordinasi dengan BKPSDM	Menunggu pemetaan kebutuhan pegawai	

PERJANJIAN KINERJA KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Nilai IKM Sekretariat	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	69,94%
2.		Persentase capaian administrasi umum dan Kepegawaian	100%	91,03%
3.		Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88,32%
4.		Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90,53%
5.		Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,54%

BAKESBANGPOL
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KABUPATEN TANAH LAUT

UMPEG

I Kasubbag Umum dan Kepegawaian							
No.	Indikator	Target	Realisasi TW 4	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61 Paket	57 Paket	93,44%	31.746.000	26.400.000	83,16%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	-	0%	6.000.000	-	0%
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	2.984.466	2.688.708	90,09%
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	100%	209.052.336	187.928.500	89,90%
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	100%	9.994.220	9.003.800	90,09%
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	100%	22.683.951	18.029.994	79,48%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen (12 Bulan)	1 Dokumen (12 Bulan)	100%	1.320.000	1.320.000	100%
9.	Penyediaan Bahan/Material	2 Paket	2 Paket	100%	14.973.380	14.973.380	100%
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	92 Laporan	92%	515.155.000	472.531.580	91,73%
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	497.863	497.863	100%
12.	Pengadaan Mebel	118 Unit	118 Unit	100%	118.370.280	104.474.400	88,32%
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	100%	276.470.726	244.236.409	88,34%

14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	75.000.000	54.265.736	72,35%
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	155.266.488	154.193.211	99,31%
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit (12 Bulan)	1 unit (12 Bulan)	75%	35.000.000	34.999.710	100%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	18 Unit	100%	176.000.000	172.909.749	98,24%
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	23 Unit	56,52%	15.000.000	14.793.000	98,62%
Total					1.665.514.710	1.513.246.040	90,86%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Pendidikan dan Pelatihan tidak terlaksana karena tidak ada bimtek untuk keuangan, pada saat perubahan tidak digeser/diubah peruntukannya		Ditiadakan pada TA selanjutnya	-

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	10%	15,39%

No	Uraian	Peserta	Kategori
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa		
	-Pagelaran Budaya Nusantara Kecil di Bumi Tuntung Pandang	22 Group	Umum
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa		
	- Pelatihan Korsik untuk 17 Agustus	40 Orang	Pegawai
	- Apel Kebangsaan	200 Orang	Pegawai
	- Sosialisasi FPK 11 kecamatan	275 Orang	Pelajar
	- Kemah Bela Negara	350 Orang	Pelajar
	- Pelatihan Obade	60 Orang	Pelajar
3	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		

	500 Orang	Pelajar
aka		
a Tk. Kabupaten	350 Orang	Pelajar
a Tk. Propinsi	6 Orang	Pelajar
Paskibraka	33 Orang	Pelajar
Paskibraka Duta		
i	33 Orang	Pelajar
	33 Orang	Pelajar
	1640 pelajar	

[illegible]

$$= \frac{\text{Jumlah Pelajar SLTA Sederajat yang Berpartisipasi}}{\text{Jumlah Pelajar SLTA Sederajat di Tala}} \times 100\%$$

$$= \frac{1640}{10.656} \times 100\% = 15,39\%$$

No	Indikator	Target	Realisasi TW 4	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	1200	100%	217.391.188	210.656.500	96,90%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	350 Orang	350 Orang	100%	475.181.663	425.535.100	89,55%
3.	Pembinaan terhadap aktifitas ke Paskibrakaan dan Purna Paskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	158.048.338	149.968.000	94,89%
4.	Pembentukan Paskibraka	37 Orang	37 Orang	100%	1.367.615.879	1.209.643.000	88,45
5.	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	33 Orang	33 Orang	100%	130.601.112	123.297.600	94,41%
	Total				2.348.838.180	2.119.100.200	90,22%

No	Kendala yang dihadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG POLITIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	100%	11,08%
		Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan

No	Uraian	Peserta 2024	No	Uraian	Peserta 2023
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah		1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	
	• Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1 kali kegiatan	50 Orang		• Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5 kali kegiatan	92 Orang
	• Rapat Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 4 kali kegiatan	120 Orang		• Sosialisasi Pemilu/Pilkada Serentak di 11 Kecamatan	605 Orang
	• Sosialisasi Pemilu/Pilkada Serentak di 11 Kecamatan	550 Orang		• Sosialisasi Pemilih Pemula SLTA Sederajat di 11 Sekolah	605 Orang
	• Sosialisasi Pemilih Pemula SLTA Sederajat di 11 Sekolah	550 Orang			
	• Bimtek Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 1 kali kegiatan	30 Orang			
	• Rapat tim pemantauan situasi politik daerah 2 kali kegiatan	100 Orang			
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan		2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala	

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah			Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	
	• Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di 11 Desa	535 Orang		• Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di 11 Desa	440 Orang
3	Monitoring				
	Total	1.935 Orang			1.742 Orang

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta 2024} - \text{Jumlah Peserta 2023}}{\text{Jumlah Peserta 2023}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.935 - 1.742}{1.742} \times 100\%$$

Peningkatan = 11,08%

No	Indikator	Target	Realisasi TW 4	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1150 Orang	1150 Orang	100%	11.474.117.289	11.468.822.150	99,95%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan	550 Orang	541 Orang	99%	82.990.808	81.982.000	98,78%

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah						
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	27.256.822	26.154.850	95,96%
	Total				11.584.364.919	11.576.959.000	99,94%

Penyesuaian Belanja setelah Pengembalian (Hibah)

No	Indikator	Target	Realisasi TW 4	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1150 Orang	1150 Orang	100%	11.474.117.289	9.429.309.717	82,18%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	550 Orang	541 Orang	99%	82.990.808	81.982.000	98,78%
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	27.256.822	26.154.850	95,96%

	Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah						
	Total				11.584.364.919	9.537.446.567	82,33%

No	Kendala yang dihadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1.	Pengembalian sisa dana hibah oleh Polres Tanah Laut			

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	25%	38,10%
2.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	75	80,268

DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) YANG MELAPOR PADA BADAN KESBANGPOL KAB. TANAH LAUT TAHUN 2024

NO.	NAMA ORGANISASI	BIDANG KEGIATAN	PENGURUS			NO TELP/HP	NO. DAN TGL. SK KEPENGURUSAN	MASA BAKTI KEPENGURUSAN		ALAMAT	NO. DAN TGL. SK KEMENKUMHAM/SKT	KET
			KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA			THN	THN			
1.	Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom) Tanah Laut -Dikunjungi-	Sosial Kemasyarakatan	SUMANTO, SE	SUSENO, SE, S.H	ABDUL GHANI	082331303130	No. KEP-010/PENGPROV-R.SK.MP/XII/2021 Tgl. 1 Desember 2021	2021	2026	Jl. Kayu Manis Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0002085.AH.01.08 TAHUN 2022 Tanggal	AKTIF
2.	Perkumpulan Bioskop Layar Rakyat (Biola Rakyat)	Sosial Kemasyarakatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, Adat, Ekonomi Kreatif	SARIS DIDING PAMUNGKI	AHMAD ZULMI	MUHAMMAD AKBARI	081327317267	SK NOMOR 001/SK-PBLR/IX/202315 September 2023 s.d 15 September 2028	2023	2028	Jl. Ki Hajar Dewantoro RT. 007A RW. 003 Gang Damai I Angsau Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0009149.AH.01.07 TAHUN 2023 Tanggal	AKTIF
3.	Yayasan An Nuur Gagas Permai (YasNuur)	Keagamaan	H.HUSIN NAPARIN, S.Sos, M.Pd.I	ARIES TRISNANTRI	DASUKI	081348103705	No. 01/SK/YasNuur-Pih/III/2024 Tgl. 6 Maret 2024	2024	2029	Komplek Gagas Permai Jl. Merak RT. 23 RW. 006 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0003538.AH.01.04 TAHUN 2024 Tanggal 1 Maret 2024	AKTIF
4.	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Tanah Laut -Dikunjungi-	Sosial Ekonomi	HAIRUDIN	HAIRUNI	AGUS HARIYANTO	081348698540	No. KEP-127/DPD HSNII/X/2023 Tgl. 9 Oktober 2023	2023	2028	Jl. H. Boejasin No. 31 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut		AKTIF
5.	Laung Kuning Banjar (LKB) DPC Tanah Laut (Kepengurusan Baru) -Dikunjungi-	Kebudayaan	USTADZ ZAINAL ABIDIN	HENDRI	AZAMUL ARABIA	081251754591	No. 03/SK/LK-DPP/VI/2024	2024	2027	Desa Tabanio RT. 017 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0002736.AH.01.07. TAHUN 2022 Tanggal 21 Maret 2022	AKTIF

6.	Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA)	Pemberdayaan Masyarakat	MISNI ARWATI, S.Pd	YUNI APRIANI	FITRIANI ANISA	085348298617	No. 004/SK/DPD-PERWIRA/V/2024 Tgl. 28 Mei 2024	2024	2029	Desa Panggung RT. 06 RW. 01 Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0019183.AH.01.07 TAHUN 2016 Tanggal 19 Februari 2016	AKTIF
7.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanah Laut	Kepemudaan	MUHAMMAD HARTONO	ZULKIFLI	AHMAD GAZALI	082253774613	No. 393/KPTS/A/08/1444 H Tgl. 3 Maret 2023	2023	224	Jl. A. Yani RT. 009 RW. 004 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0001363.AH.01.08 TAHUN 2021 Tanggal 1 Oktober 2021	AKTIF
8.	Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Tanah Laut (PC IPNU Tanah Laut)	Kepemudaan	RAHMAT AZIZ RAIHAN	WIRDAN	MUHAMMAD IRHAS	083142018765	No. 063/PP/SP/XX/7354/V/ 23 Tgl. 5 Oktober 2023	2023	2025	Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0000184.AH.01.08 TAHUN 2022 Tanggal 31 Januari 2022	AKTIF
9.	Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia Kera Sakti (IKSPIKS)	Sosial Kemasyarakatan	SUWANDI	MUHAMMAD HARTONO	M. NUR ADI	085251891653	No. 221/SK/IKSPI/Pusat/ IX/2020 Tgl. 10 September 2020	2020	2025	Komplek Hampanan Permai Blok F No. 31 RT. 011 RW.002 Desa Atu Atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0034330.AH.01.04 TAHUN 2015 Tanggal 30 Desember 2015	AKTIF
10.	Forum Komunikasi Putra Putri Pumawirawan dan Putra Putri TNI POLRI (FKPPI) Cabang Kab. Tanah Laut	Sosial Kemasyarakatan	H. AMPERANSYAH, SKM, MS	GT. M. HARIS FADILLAH,SP,M.Ling	MISPUWATI	081250508840	No.: 009/PDXVI/KB-FKPP I /VII/2023 Tgl. 14 Juli 2023	2023	2028	Jl. Gembira No. 29 B RT. 05 RW. 002 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0000897.AH.01.08 TAHUN 2022 Tanggal 28 April 2022	AKTIF
11.	Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tanah Laut (PC PMII Tanah Laut)	Keagamaan	ISTI KHOMARIYAH	RAHMAT AZIZ RAIHAN	RAUDHATUL HERLINA NINGSIH	082258282053	No. 482.PB-XX.01.379.A-1.03.2024Tgl. 5 Maret 2024	2024	2025	Jl. A. Syairani Gedung Juang Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari	Nomor AHU-0001356.AH.01.08.TA HUN 2021 Tanggal 29 September 2021	AKTIF
12.	Cabang Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. Tanah Laut (RTIK Tanah Laut)	Pendidikan	HARIYANOR	MUSTAQIM	ISTI KHOMARIYAH	085345631654	No. 135/PP/SP/3/27524/V/ 2024 Tgl. 27 Mei 2024	2024	2029	Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Nomor AHU-0000524.AH.01.07.Ta hun 2015 Tanggal 14 April 2015	AKTIF

13	Persatuan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tanah Laut -Dikunjungi-	Sosial Kemasyarakatan	GUNARSO	SRI HARYATI	ABDUL SANI	081351947536	No. KEP-14 / PABPDSI / KALSEL / VI / 2024	2024	2027	Desa Batu Ampar Rt. 015 Rw. 005 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut	Nomor SKT 1108-00-00/080/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022	AKTIF
14	Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Kabupaten Tanah Laut -Dikunjungi-	Keagamaan	SARPONIRAH	FERA NATALIA	PURNAMAWATI GULTOM	081251810132	No. 08/DPD-PWKI/Kal-Sel/BJM/VI/2024 Tgl.25 Juni 2024	2024	2029	Jl. Flamboyan Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut	Nomor AHU-0000647.AH.01.07 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024	AKTIF
15	The Universal Line Dance Wil. Kabupaten Tanah Laut	Kesenian	Dra. MADE DARTY	FITRIANI,S.Ag	YULIANTI,S.Sos	085386450212	No. 002-1/SKEP/ULD/IX/2021	2021	2026	Komplek Kijang Mas Blok D Rt.010 Rw.004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari	Nomor AHU-0013199.AH.01.07.Tahun 2015 Tanggal 3 November 215	AKTIF
16	Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Al-Irsyad Kabupaten Tanah Laut	Keagamaan	Dr. RIJANI RAIS, Sp.An	HABIL MA'RUF PRAYUGO	JAENUDIN	08113050903	No. SK.03/DPP/II/1446	2024	2027	Desa Sarang Halang Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Nomor AHU-0001409.AH.01.08 Tahun 2022 Tanggal 23 Juli 2022	AKTIF
17	Relawan Tala Jaya (RTJ) Rescue 911 Kabupaten Tanah Laut -Dikunjungi-	Sosial Kemasyarakatan	NICO ALFIANDY	IWAN CAHYADI ANSHARI	RAIMOND HENDRA	085386701936	No. SK.01/PRKMLN/TALA/IX/2024	2024	2029	Jl. Vihara Rt. 021 Rw. 006 Kel. Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Nomor AHU-0010953.AH.01.07 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021	AKTIF
18	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI)	Olahraga	YUNI RAHMAN	TAJIDINNOOR, S.Pd	HERNY PANGESTU, S.Pd	085251397878	No. SK.10/KORMI-KS/II/2024	2024	2026	Jl. Hutan Kota Rt. 026 Rw. 007 Kel. Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Nomor AHU-0001363.AH.01.08 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020	AKTIF

19	Organisasi Pecinta Alam Tuntung Pandang Meratus Kab. Tanah Laut (ORPALA TUPAN MERATUS) -Dikunjungi-	Sosial Kemanusiaan dan Sosial Kemasyarakatan dan Lingkungan	RENDY DWI NOPA ARYADI	RAUDAH	NURUL HIKMAH	085386014915	No. SK.009/MUSTA-XI/OTM TALA / VI / 2022/	2024	2023	Jl. Datu Insad Rt. 000 Rw. 000 Kel. Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut		AKTIF
20	Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)	Nasional, Sosial Kemasyarakatan	SARI JAYALANA	Dra. Hj. KUSDIAH	Hj. RAUDANIAH, S.Sos	085348277570	No. SK.01 / P-KS / IX / 2024	2024	2028	Jl. Sapta Marga Rt. 009 Rw. 000 Kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Surat Keterangan Terdaftar Berbadan Hukum Nomor 01-00-00/295/V/2018 pada Tanggal 22 Mei 2018	AKTIF
21	Perjuangan Tarshidiyah Kalimantan (PTK) -Dikunjungi-	Sosial Kemasyarakatan	MAWARDI	MUHAMMAD YUSNI	MUHAMMAD ARIFIN	085248988611	No. SK.002 / SK-PTK / X / 2024	2024	2029	Desa Handil Birayang Bawah Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	Nomor AHU-009171.AH.01.07 Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024	AKTIF

$$\frac{\text{Jumlah Ormas yang dikunjungi}}{\text{Jumlah Ormas Aktif yang Melapor}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{21} \times 100\%$$

$$= 38,10\%$$

KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TAPALONG	86,875	TINGGI

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 4	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	80 Orang	100%	322.499.876	315.495.550	97,83%
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	1110 Orang	1110 Orang	100%	1.226.705.851	1.197.178.550	97,59%
4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180 Orang	180 Orang	100%	104.997.974	98.061.200	93,39%
	Total				1.654.203.701	1.610.735.300	97,37%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1	Masih terdapat Ormas yang belum melaporkan keberadaannya ke Badan Kesbangpol	Pemberian pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Ormas	Kunjungan ke Ormas-Ormas yang ada di Kecamatan	

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sesuai SOP melalui fasilitasi	100%	100%

$$= \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang ditangani sesuai SOP}}{\text{Jumlah Kasus Sosial yang terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ Kasus}}{2 \text{ Kasus}} \times 100\%$$

No	Konflik	Tempat Kejadian Konflik
1	Dugaan penghinaan terhadap Guru Sekumpul yang dilakukan oleh seorang ASN di media sosial	Desa Padang Luas, Kurau
2	Penggunaan Musholla warga RT 10 Kelurahan Pabahanan bersamaan dengan jamaah Salafi	Kelurahan Pabahanan, Pelaihari

No.	Indikator	Target	Realisasi TW 4	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	999.788	987.580	98,78%
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	3 Orang	2 Orang	66,67%	14.710.000	7.520.860	51,13%
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	520 Orang	520 Orang	100%	268.648.598	263.579.136	98,11%
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	22.099.439	14.951.000	67,65%

5.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	625.000.000	540.114.452	86,42%
	Total				931.457.825	827.153.028	88,80%

No	Kendala yang di hadapi (Permasalahan)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penyelesaian	Inovasi
1	Anggaran Makan Minum Forkopimda tidak mencukupi	Bekerja sama dengan Bagian Umum Setda		-



KESIMPULAN

A. Catatan :

- Secara keseluruhan capaian realisasi keuangan triwulan 4 pada Badan Kesbangpol sudah baik dan melampaui target yang telah ditetapkan (94,82%) dan realisasi setelah pengembalian dana hibah menjadi 86,01%
- Pilkada serentak telah selesai dilaksanakan, dan berjalan dengan sukses dan kondusif
- Belanja Makan Minum untuk malam Tahun Baru menggunakan anggaran di Bagian Umum Setda
- Terjadi efisiensi belanja pada pos hibah pengamanan Pilkada sebanyak Rp. 2.036.593.000
- Kekurangan SDM Aparatur pada Badan Kesbangpol, sehingga perlu berkoordinasi dengan BKPSDM

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790629 20003 1 004

KABUPATEN TANAH LAUT

Monitoring dan Evaluasi Renstra 2024-2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			Capaian Kinerja Tahun
					2024	2025	2026	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKU Eselon II								
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Nilai LKj Badan Kesatuan Bangsa & Politik	80,00 (BB)	82 (BB)	83 (BB)	85 (A)	77 (BB)
2	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Presentase Potensi Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Tertangani	%	100%	100%	100%	100%
IKU Eselon III								
1	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi yang tertib efektif dan efisien	Nilai IKM sekretariat Kesbangpol	Nilai IKM	Nilai	87	88	90	87,34
			Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	90,86%
			Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	86,78%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Nilai	87	88	90	77
2	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas , Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	%	100%	100%	100%	11,08%
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	%	100%	100%	100%	38,10%
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Nilai	80	81	82	80,268
6	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	%	10%	15%	20%	15,39%

Matrik Keselarasan Antara Renstra PD 2024-2026 dengan Renja 2024																						
Tujuan			Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub			Target			Keterangan (tidak Sesuai)	Catatan Verifikasi
Renstra	Renja	LKJ	Renstra	Renja	LKJ	Renstra	Renja	LKJ	Renstra	Renja	LKJ	Renstra	Renja	LKJ	Renstra	Renja	LKJ	Renstra	Renja	LKJ		
Terwujudnya tatanan nilai- nilai kewaspadaan diri bagi masyarakat	Meningkatkan Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan di Daerah	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat										Indeks Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	88 Nilai	100%		Unsur Penghitung Indeks belum ditetapkan	
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persentase pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	100%	100%	10%	Terjadi Penyesuaian setelah Desk bersama Tim SAKIP Kabupaten	
									Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan / Sosialisasi, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran	Meningkatkan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%		
												Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%		
												Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang		
												Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	110 Orang	110 Orang	350 Orang	Penambahan Kegiatan Kemah Bela Negara pada APBD-P	
												Pelaksanaan monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2 Laporan		sub tidak digunakan		
												Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			10 Keluarga		sub tidak digunakan		
															Pembinaan terhadap aktivitas kepasakbrakan dan purnapaskabraka	Laporan Hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepasakbrakan dan purnapaskabraka	Laporan Hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepasakbrakan dan purnapaskabraka	1 Dokumen	1 Dokumen		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
															Pembentukan Pasakbraka	Jumlah Pasakbraka	Jumlah Pasakbraka	37 Orang	37 Orang		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
															Pengangkatan Purnapaskabraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskabraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskabraka Duta Pancasila	37 Orang	37 Orang		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan politik masyarakat	100%	100%	100%		
																	Jumlah satuan pendidikan yang mendapat sosialisasi			11 Satuan Pendidikan	Terjadi Penyesuaian setelah Desk bersama Tim SAKIP Kabupaten	
									Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam melakukan pembinaan Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam melakukan pembinaan Politik	100%	100%	100%		
												Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			2 Dokumen		sub tidak digunakan		
												Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			2 Dokumen		sub tidak digunakan		
												Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	625 Orang	900 Orang	1150 Orang	Pendidikan Politik menjelang Pemilu dan Pilkada	
												Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang	550 Orang	550 Orang	Pendidikan Politik menjelang Pemilu dan Pilkada	pendidikan politik desa peduli pemilu

[illegible]

												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit				
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit				
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit				

Mengetahui
Kepala Badan Kesbangpol



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004